LAPORAN KINERJA 2021

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

2021

1500533 HALOBPOM

pontianak.pom.go.id @BPOMPontianak Bbpom Pontianak @bbpom.ponti 082255470600

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di

Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2021 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2021 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 berbagai tantangan pengawasan antara lain pengawasan sarana yang tidak dapat dilakukan secara *on-site,* KIE yang tidak dapat menjangkau masyarakat secara tatap muka langsung, pembatasan perjalanan ke kabupaten/kota sehingga pemeriksaan sarana dan sampling dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan tidak bisa dilakukan pada semua kabupaten/kota. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran

pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori baik. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pontianak, Februari 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,78% (**Baik**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja sebesar 96,23% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja sebesar 100,93% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian

kinerja 104,79% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar 99,58% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar 109,89% (**Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal dengan capaian sebesar 98,50% (**Baik**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal dengan capaian sebesar 102,18% (**Baik**). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 87,72% (**Cukup**). *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.

11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar 101,26% (**Baik**). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kriteria **Baik** dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 99,65%. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kriteria **Cukup**, yaitu Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Baik** sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN UPT, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Nilai Kinerja Anggaran UPT, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT. Terdapat juga capaian indikator kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** sebanyak

3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,0 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,0. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Outcome yang ingin dicapai dalam pengukuran efisiensi ini adalah komitmen akuntabilitas anggaran Balai Besar POM di Pontianak agar membawa manfaat yang ideal kepada masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan perencanaan. Anggaran Balai Besar POM di Pontianak merupakan Uang Negara yang diamanahkan dan harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

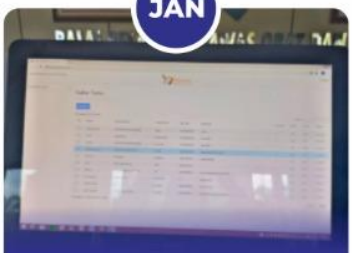
Adapun penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp28,507,345,228,- (99,64%) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp28,611,346,000,-. Realisasi anggaran di tahun 2021 ini termasuk kategori **Baik** dan hal ini sangat menunjang capaian sasaran semua kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari tercapainya Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 99,65%.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, Tanpa Izin Edar (TIE), dan palsu melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor dalam bentuk operasi gabungan.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Organisasi Profesi (IAI dan PAFI), Asosiasi Pelaku Usaha (ASPADIN, GP Farmasi, dan Perkrindo), serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

HIGHLIGHT

JAN



AKUMU
(Aplikasi Buku Tamu)
Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat mengisi Aplikasi Buku Tamu yang tersedia pada layar monitor yang ada di Lobby.

JAN



ASTAGA
(Aplikasi Surat Tugas)
Inovasi yang membawa pegawai BBPOM di Pontianak a.n. **Chatulis Indra Jaya** menjadi **Pegawai Teladan dan Pegawai Berinovasi Tingkat Nasional**. Aplikasi Surat Tugas ini telah direplikasi oleh unit kerja lain.

FEB



CORAK INSANG
(Corong Aktifitas dan Informasi Sang Pegawai)
Merupakan aplikasi yang dibuat dan digunakan oleh Balai Besar POM di Pontianak, Corak Insang berisi tentang **aktifitas dan informasi pegawai Balai Besar POM di Pontianak**

MAR



Akselerasi Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021

MAR



AGI JAKK
(Aksi Dampingi & Jangkau UMKM Kalbar)
AGI JAKK memfasilitasi **percepatan pengembangan dunia usaha** obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM.

APR



Pelatihan Deteksi SARS CoV2 Dengan Teknik RT-PCR

APR



Bimbingan Teknis Awareness & Audit Internal Training ISO 9001 : 2015

MEI



Pengaduan SIPONTI
Formulir Pengaduan dan Tindak Lanjut BBPOM di Pontianak
https://bit.ly/SIPONTI

SIMPATIK
(Saluran Informasi dan Pengaduan Cepat Melayani Konsumen BBPOM Pontianak)
Pelayanan pengaduan terkait obat dan makanan dilakukan melalui link **bit.ly/SIMPATIKBBPOMPTK**

JUN



Pelatihan Pembekalan Komunikasi dalam Pelayanan Publik



Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.



Pembinaan Pegawai oleh Sekretaris Utama dan Deputi IV Badan POM RI.



Pemusnahan Arsip Balai Besar POM di Pontianak.



Webinar Kecantikan



Jaring Laba-Laba (Jaringan Laporan Berbasis Kinerja)

Aplikasi yang digunakan untuk memantau Kinerja Balai Besar POM di Pontianak.



Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Jumpe Pak Long!

Bentuk layanan untuk menerima laporan/pengaduan dengan **berjumpa langsung** bersama Kepala Balai Besar POM di Pontianak.



Audit Eksternal Sertifikasi ISO 9001 : 2015



PARIS (Papan Risiko)

Papan informasi yang memuat jenis-jenis risiko yang ada di setiap Kelompok Substansi Balai Besar POM di Pontianak.



KOPER
(Kontrak Pengendalian Risiko)
Timeline perjanjian penyelesaian risiko antara kepala balai dengan pemilik risiko.



KIE Thomas



Asistensi Laboratorium Pengujian COVID



Penghargaan Desa Pangan Aman



Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal dan Tidak Memenuhi Ketentuan
Berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak periode tahun 2020-2021.



Koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Barat



Food Security



Intensifikasi Jelang Natal dan Tahun Baru

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY iv
HIGHLIGHT ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR TABEL xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2.Gambaran Umum Organisasi 2
1.3.Struktur Organisasi 10
1.4. Isu Strategis 13
BAB II 18
PERENCANAAN KINERJA 18
2.1. Rencana Strategis 18
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan 19
2.3. Budaya Organisasi 30
2.4. Sasaran Strategis 33
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 46
2.6. Perjanjian Kinerja 49
2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 54
2.8. Kriteria Pencapaian Indikator 56
BAB III 58
AKUNTABILITAS KINERJA 58
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 58
3.2 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 234
3.3 Realisasi Anggaran 236
BAB IV 251
PENUTUP 251
4.1. Kesimpulan 251
4.2. Saran 253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 7
Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 12
Gambar 1.3.2. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Sanggau 13
Gambar 2.2.1. Visi, Misi dan Tujuan Badan POM 20
Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan 24
Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan 25
Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 33
Gambar 3.1.1. Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance 59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 10

Grafik 3.1.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 70

Grafik 3.1.2. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 76

Grafik 3.1.3. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 84

Grafik 3.1.4. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 91

Grafik 3.1.5. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 97

Grafik 3.1.6. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 104

Grafik 3.1.7. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 110

Grafik 3.1.8. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 117

Grafik 3.1.9. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 122

Grafik 3.1. 10. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 127

Grafik 3.1.11. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 132

Grafik 3.1.12. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 138

Grafik 3.1.13. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 148

Grafik 3.1.14. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 153

Grafik 3.1.15. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 159

Grafik 3.1.16. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 164

Grafik 3.1.17. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 169

Grafik 3.1.18. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 174

Grafik 3.1.19. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 180

Grafik 3.1.20. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding 186

Grafik 3.1. 21. Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding 192

Grafik 3.1.22. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 198

Grafik 3.1. 23. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 203

Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 210

Grafik 3.1.25. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis 216

Grafik 3.1.26. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 222

Grafik 3.1.27. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 227

Grafik 3.1.28. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 231

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya 7

Tabel 1.2.2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 9

Tabel 2 .4.1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 34

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 46

Tabel 2.6.1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 49

Tabel 2.7 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021Balai Besar POM di Pontianak 54

Label 2.8.1 Kriteria Pencapaian Indikator 57

Tabel 3.1.1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 60

Tabel 3.1. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 62

Tabel 3.1.3 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 68

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun dengan Tahun 2020 68

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 69

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 69

Tabel 3.1.7 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 74

Tabel 3.1.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Tahun 2020 75

Tabel 3.1.9 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 75

Tabel 3.1.10 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 76

Tabel 3.1.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 81

Tabel 3.1.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 82

Tabel 3.1.13 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 ... 82

Tabel 3.1.14 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 83

Tabel 3.1.15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 89

Tabel 3.1.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 90

Tabel 3.1.17 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 ... 90

Tabel 3.1.18 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 91

Tabel 3.1.19 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 95

Tabel 3.1.20 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 96

Tabel 3.1.21 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 96

Tabel 3.1.22 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat 100

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021 101

Tabel 3.1.24 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021 dengan Tahun 2020 102

Tabel 3.1.25 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 102

Tabel 3.1.26 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 103

Tabel 3.1.27 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 108

Tabel 3.1.28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 108

Tabel 3.1.29 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 109

Tabel 31.1 30 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 110

Tabel 3.1.31 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM. 114

Tabel 3.1.32 Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 114

Tabel 3.1.33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 115

Tabel 3.1.34 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 115

Tabel 3.1.35 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 116

Tabel 3.1.36 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 120

Tabel 3.1.37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2021 120

Tabel 3.1.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya 121

Tabel 3.1.39 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 121

Tabel 3.1.40 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pembanding 122

Tabel 3.1.41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 125

Tabel 3.1.42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 126

Tabel 3 .1.43 PerbandinganPersentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Target 2024 126

Tabel 3.1. 44 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 127

Tabel 3.1.45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak..... 130

Tabel 3.1.46 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 131

Tabel 3.1.47 Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 131

Tabel 3.1.48 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 132

Tabel 3.1.49 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021..... 136

Tabel 3.1.50 Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020 136

Tabel 3.1.51 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun 2024 137

Tabel 3.1.52 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 137

Tabel 3.1.53 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 141

Tabel 3.1.54 Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 142

Tabel 3.1.55Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2024 142

Tabel 3.1.56 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 143

Tabel 3.1.57 Perbandingan dan Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak... 146

Tabel 3.1.58 Perbandingan pencapaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan tahun 2020 146

Tabel 3.1.59 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2024 147

Tabel 3.1.60 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 147

Tabel 3.1.61 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 151

Tabel 3.1.62 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 151

Tabel 3.1.63 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 152

Tabel 3.1.64 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE 156

Tabel 3.1.65 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 157

Tabel 3.1.66 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 157

Tabel 3.1.67 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2024 158

Tabel 3.1.68 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 158

Tabel 3.1.69 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 162

Tabel 3.1.70 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2020 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2021 162

Tabel 3.1.71 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021 dengan Tahun 2024 163

Tabel 3.1.72. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding..... 164

Tabel 3.1.73. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 167

Tabel 3.1.74 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 dan Tahun 2021 167

Tabel 3.1.75. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021 dengan Tahun 2024 168

Tabel 3.1.76. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 168

Tabel 3.1.77 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021..... 172

Tabel 3.1.78 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 dan Tahun 2021..... 172

Tabel 3.1.79. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021 dengan Tahun 2024 173

Tabel 3.1.80 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 173

Tabel 3.1.81 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar..... 178

Tabel 3.1.82. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2021 179

Tabel 3.1.83 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2021 179

Tabel 3.1.84 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 180

Tabel 3.1.85 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 183

Tabel 3.1.86 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019..... 184

Tabel 3.1.87 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun 2024..... 185

Tabel 3.1.88 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding 185

Tabel 3.1.89 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun..... 189

Tabel 3.1.90 Pencapaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020 190

Tabel 3.1.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 191

Tabel 3.1.92 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain Sebagai Pembanding 191

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021..... 196

Tabel 3.1.94 Perbandingan Pencapaian Indeks RB BBPOM Pontianak Tahun 2020 dan 2021 197

Tabel 3.1.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 197

Tabel 3.1.96 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding..... 198

Tabel 3.1.97 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021..... 201

Tabel 3.1.98 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Tahun 2020 202

Tabel 3.1.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 202

Tabel 3.1.100 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 203

Tabel 3.1.101 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 208

Tabel 3.1.102 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Tahun 2020 208

Tabel 3.1.103 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 209

Tabel 3.1.104. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 209

Tabel 3.1.105. Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium 213

Tabel 3.1.106.Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium 214

Tabel 3.1.107 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2021 dengan tahun 2020 214

Tabel 3.1.108 Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 215

Tabel 3.1.109 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding 216

Tabel 3.1.110.Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 220

Tabel 3.1.111 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020 220

Tabel 3.1.112 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 221

Tabel 3.1.113 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 221

Tabel 3.1.114 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 225

Tabel 3.1.115 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020 225

Tabel 3.1.116 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 226

Tabel 3.1.117 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 226

Tabel 3.1.118. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 229

Tabel 3.1.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020 230

Tabel 3.1.120 Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 230

Tabel 3.1.121 Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 231

Tabel 3.2.1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 236

Tabel 3.2 .2 Indeks dan Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 242

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Agar program Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan POM RI membentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota. Wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak mencakup 12 kabupaten/kota meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

1.2.Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Provinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a. Kota Pontianak : -
b. Kota Singkawang : 4 jam (sekitar 150 km)
c. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam

d.	Kabupaten Mempawah	:	2 jam (sekitar 75 km)
e.	Kabupaten Bengkayang	:	5 jam (sekitar 160 km)
f.	Kabupaten Sambas	:	7 jam (sekitar 230 km)
g.	Kabupaten Landak	:	4 jam (sekitar 135 km)
h.	Kabupaten Sanggau	:	4 jam (sekitar 185 km)
i.	Kabupaten Sekadau	:	6 jam (sekitar 260 km)
j.	Kabupaten Sintang	:	9 jam jalur darat (sekitar 320 km), atau 40 menit jalur udara
k.	Kabupaten Melawi	:	10 jam (sekitar 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (sekitar 90 km)
l.	Kabupaten Kapuas Hulu	:	15 jam jalur darat (sekitar 580 km), atau 70 menit jalur udara
m.	Kabupaten Ketapang	:	12 jam jalur darat (sekitar 335 km), atau 40 menit jalur udara
n.	Kabupaten Kayong Utara	:	13 jam jalur darat (sekitar 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang sekitar 45 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (sekitar 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang

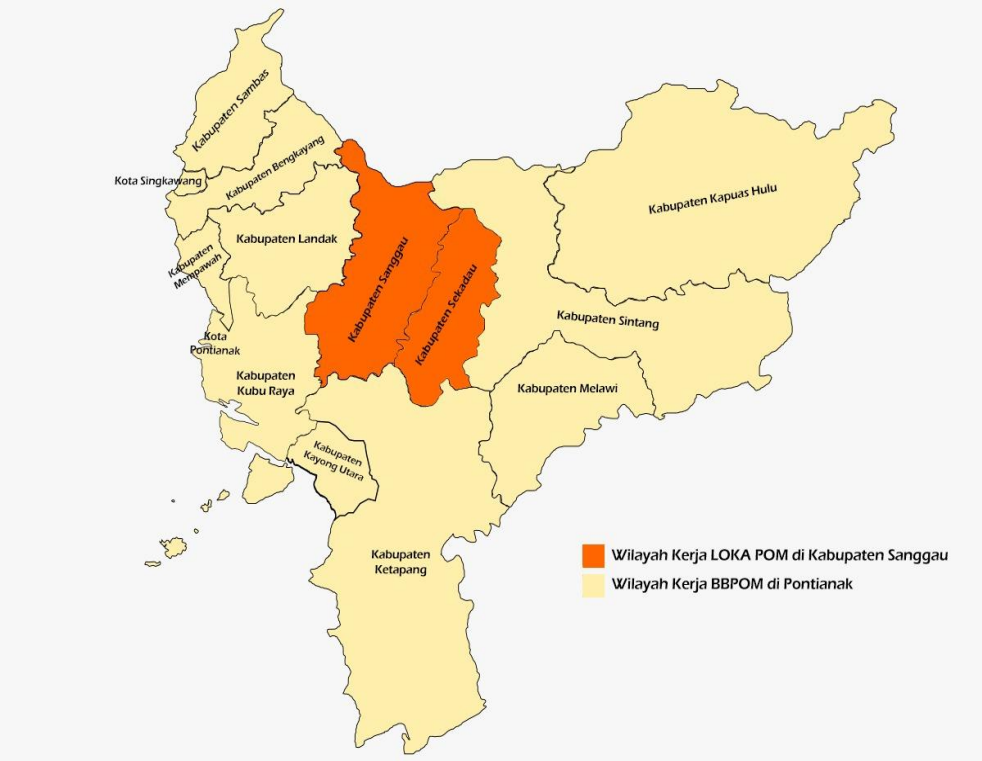
tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi dengan total 2.032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM Aruk dan dibantu oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang berbatasan dengan Malaysia yaitu di Kecamatan Entikong. Loka POM di Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga. Strukturnya terdiri dari Kepala Loka dan pejabat fungsional. Kepala Loka POM bertanggung jawab langsung ke Kepala Badan POM dan berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar POM di Pontianak.



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM Sanggau, dan Pos POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 122 orang dengan rincian 97 orang pegawai Balai Besar POM di Pontianak, 22 orang pegawai di Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan 3 orang di Pos POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

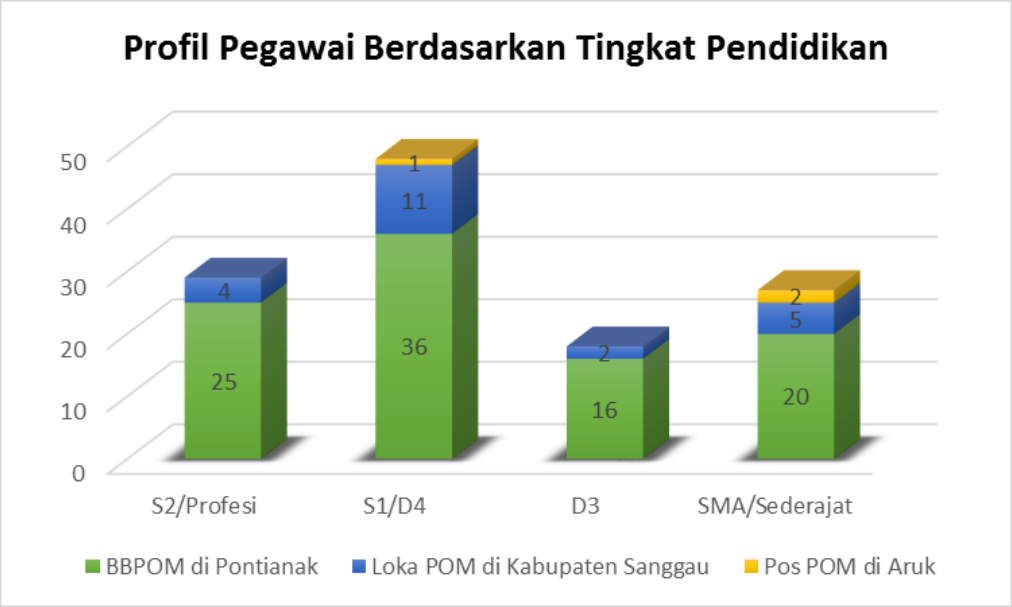
Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1		
Kepala Bagian Tata Usaha	1		
Kepala Loka POM di Sanggau		1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	10	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	4		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	6		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	1		
Analis Anggaran Ahli Muda	1		
Analis Kepegawaian Mahir	1		
Pengadministrasi Umum	2		
Pengadministrasi Keuangan	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Perencana Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	1		
Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1		
Pranata Komputer Terampil	2	1	
Analis Layanan Umum	1		
Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan	1		
Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	2		
Analis Laboratorium	3		
Analis Laporan Keuangan	1		
Analis Anggaran	1		
Verifikator Keuangan		1	
Arsiparis Terampil	1		
PPNPN	24	9	3
Jumlah Total	**97**	**22**	**3**

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 29 orang, Strata 1/sederajat 47 orang, Diploma 3 sebanyak 18 orang dan SMA/sederajat sebanyak 27 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar. Pada tahun 2021, terdapat sembilan orang yang mengikuti program tugas belajar dan empat orang yang mengikuti program izin belajar.

Tabel 1.2.2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	**BBPOM di Pontianak**	**Loka POM di Kabupaten Sanggau**	**Pos POM di Aruk**
S2/Profesi	25	4	
S1/D4	36	11	1
D3	16	2	
SMA/Sederajat	20	5	2
Total	**100**	**22**	**3**



Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.3.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari Kepala Bagian tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

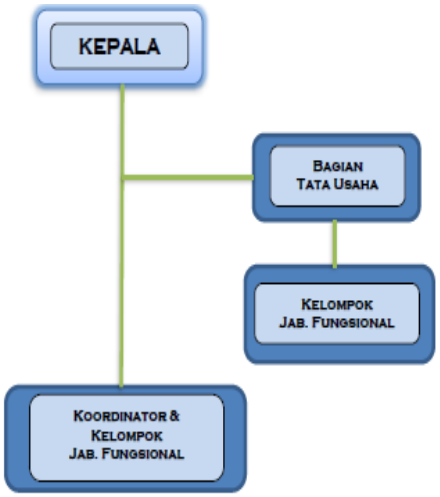
2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

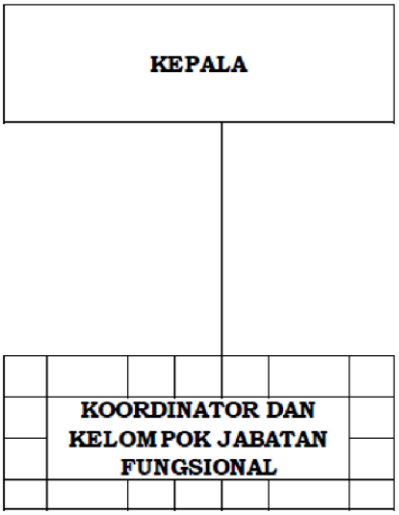


Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Loka POM Sanggau terdiri atas:

a. Kepala; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.3.2. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Sanggau

1.4. Isu Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan

kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2) Masih merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dan terjadinya lonjakan kasus positif di pertengahan tahun 2021 menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat (PPKM) sesuai dengan kondisi setiap daerah. Hal ini menuntut Balai Besar POM di Pontianak untuk merespon dengan melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif, sekaligus menjaga produktivitas untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagian kegiatan pemeriksaan dan KIE dialihkan dari *offline* menjadi *online*.

3) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA), ASEAN-India *Free Trade Agreement* (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Di lain pihak, adanya perjanjian perdagangan internasional ini dapat memacu pelaku usaha di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Balai Besar POM di Pontianak dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan distribusi produknya.

4) Adanya terobosan hukum berupa *Omnibus Law* yang menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, memberikan pengaruh terhadap proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan.

5) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri.
7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga / Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam hal ini Balai Besar POM di Pontianak dituntut untuk selalu berupaya untuk menyesuaikan proses reformasi birokrasi baik dengan *Grand Design* RB tersebut maupun *roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM RI.
9) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

10) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one-line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Balai Besar POM di Pontianak harus dapat menyelaraskan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat terutama yang terkait pemangku kepentingan di pemerintah daerah dengan program kerja Badan POM RI.
11) Masih adanya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans. Dalam program farmakovigilans, Balai Besar POM di Pontianak berpartisipasi dalam monitoring efek samping obat.
12) Adanya warga Kalimantan Barat yang berobat ke rumah sakit di Kuching dan Serawak (Malaysia) menjadi tantangan terhadap pengawasan masuknya produk obat-obatan dari Malaysia melalui wilayah perbatasan, baik melalui barang bawaan pelintas melalui

jalur PLBN, ataupun melalui jalur tidak resmi. Dengan kondisi *lockdown* antar negara modus yang sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah jasa titip pembelian obat.

13) Pertumbuhan industri Obat dan Makanan, khususnya industri UMKM pangan, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, serta rendahnya inisiatif untuk mendaftarkan produknya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha dengan metode jemput bola, serta dukungan sampling dan pengujian untuk pendaftaran produk UMKM. Selain industri pangan, terdapat juga potensi industri obat tradisional. Sebagai contoh, terdapat produk obat tradisional yang berasal dari tanaman endemik di Pulau Kalimantan yaitu bajakah, pasak bumi dan bawang dayak, namun hingga saat ini belum terdapat industri obat tradisional yang memproduksi produk tersebut dengan izin edar TR. Belum adanya kajian ilmiah keamanan, manfaat dan mutu bahan alam tersebut menjadi salah satu kendala pengembangan industri obat tradisional di Kalimantan Barat.

    Terdapat industri kosmetik hasil pendampingan yang mampu menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

14) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan *trend* transaksi Obat dan Makanan secara daring meningkat signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan secara daring (patroli siber), produk ilegal yang paling banyak ditemukan adalah kosmetik dan obat tradisional. Tantangan pengawasan secara daring meliputi identitas penjual yang tidak jelas, alamat penjual yang tidak pasti, modus penjualan *dropshipping* yang menyulitkan pengungkapan kasus, sehingga diperlukan metoda baru, peralatan khusus yang memadai, dan petugas yang kompeten.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

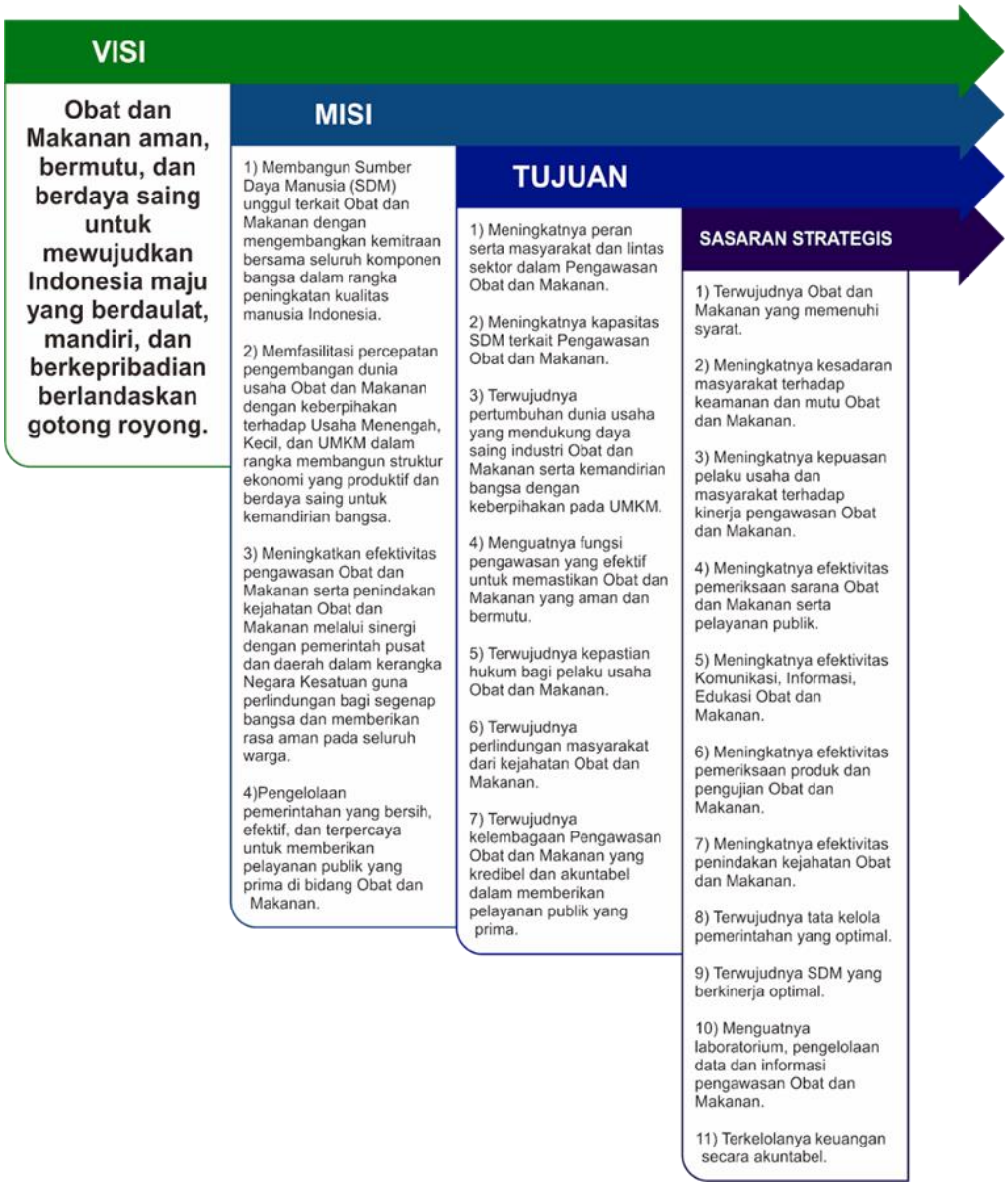
Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium

modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2.1. Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

A. **Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu:

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan

Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing: Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu :

"Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

B. **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia.* Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

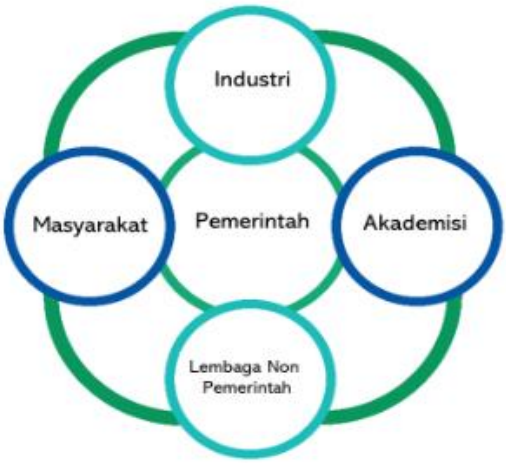
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku

kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.* Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima

sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar

9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.*

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

(2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai

dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.* Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung

terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Pontianak menjadi semangat bagi

seluruh anggota Balai Besar POM di Pontianak dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. **Profesional**
   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Integritas**
   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. **Kredibilitas**
   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**
   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. **Inovatif**
   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. **Responsif/Cepat Tanggap**
   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Balai Besar POM di Pontianak juga memiliki moto sebagai penyemangat dan motivasi yaitu TANJAK. TANJAK merupakan akronim dari Tangguh, Amanah, Nasionalis, Jujur, Adaptif, dan Kreatif, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

T : Tangguh

Kuat Karakter dan pendirian, tidak mudah menyerah, tabah dan tahan menghadapi segala tantangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban

A : Amanah

Bertanggung jawab serta mempu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

N : Nasionalis

Cinta tanah air, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan

J : Jujur

Tulus, sesuai antara ucapan, perkataan dan perbuatan

A : Adaptif

Cepat belajar, lincah bergerak dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang semakin cepat.

K : Kreatif

Mampu berfikir, menciptakan suatu ide serta bertindak dengan cerdas dan berbeda dalam menyelesaikan masalah untuk membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Kata TANJAK diambil dari nama penutup kepala kaum laki-laki suku Melayu yang memiliki makna filosofi sebagai sebuah lambang kehormatan yang harus dijaga karena bertaut maruah atau harga diri. Simbol Tanjak adalah sebuah amanah sekaligus kekuatan untuk melaksanakannya, didalamnya terdapat nasihat dan anjuran agar kita dapat memanfaatkan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri dan masyarakat serta bangsa dan negara. Tanjak juga sebagai simbol sebuah peradaban, arah Tanjak yang selalu mengarah ke atas

melambangkan prinsip hidup yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Ketuhanan. Nilai-nilai filosofi TANJAK menjadi moto, sebagai penyemangat dan motivasi seluruh insan Balai Besar POM di Pontianak dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2 .4.1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak									
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	91
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	89
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	99
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	73	76	79	82	81	83	85	87

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	94,6
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	75,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	75
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana	55	60	65	65	78	80	83	85

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan								
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	60
	5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak								
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,6
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
19	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
	6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak								
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
	7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak								

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal									
24	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
25	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal									
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	83,75
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	91
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel									
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	95,8
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak

sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

   Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan

hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk

Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar

POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 94,6 pada akhir tahun 2024.
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024.
3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.
7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,6 pada akhir tahun 2024.
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024**.**

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas

pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,6 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,75 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95,8 pada akhir tahun 2024.
2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR. 04.04.01.107.1071.11.20.2683 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	73

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
	Indeks Pelayanan Publik	3,76
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
	Jumlah desa pangan aman	12

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91
	Nilai AKIP UPT	84
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83%

2.6. Perjanjian Kinerja

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2021, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan RKT Tahun 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 31.592.258.000. Namun dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024 dan *refocusing* anggaran guna penanggulangan pandemi covid, maka Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 telah dilakukan perubahan berdasarkan dokumen reviu tersebut diatas ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 28.611.346.000, sebagaimana tabel 2.6.1 berikut:

Tabel 2.6.1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021 (Semula)	Target 2021 (Menjadi)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%	88%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94%	86%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	73%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	95%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	73	81

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021 (Semula)	Target 2021 (Menjadi)
masing–masing wilayah kerja UPT			
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	91,1
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	68,07
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	89%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8%	60%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	99%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21%	30%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	78%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021 (Semula)	Target 2021 (Menjadi)
	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	90,10
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40
	Jumlah desa pangan aman	12	12
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91%	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91%	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	91%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91	84,90
	Nilai AKIP UPT	84	80,10
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85%	76%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021 (Semula)	Target 2021 (Menjadi)
pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	92,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83%	95%

Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan :

Semula : Rp31.592.258.000,-

Menjadi : Rp28.611.346.000,-

Perubahan target indikator pada Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada hasil reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak yang bertujuan untuk merespon perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Balai Besar POM di Pontianak. Dalam perubahan target ini, terdapat target yang dinaikkan dan diturunkan dengan capaian tahun lalu dan usulan target dari Biro Perencanaan sebagai dasar revisi target setiap indikator.

Adapun target indikator yang ditingkatkan diantaranya:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

6. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
7. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
8. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Indeks Pelayanan Publik
10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
14. Indeks Profesionalitas ASN UPT
15. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Sedangkan untuk target indikator yang diturunkan diantaranya:

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
3. Indeks RB UPT
4. Nilai AKIP UPT
5. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
6. Nilai Kinerja Anggaran UPT

2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021Balai Besar POM di Pontianak

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Pontianak
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6			88	230.454.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80			80	45.684.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			94			94			94			86	124.983.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			73			73			73			73	128.343.500, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat												95	5.012.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	15.221.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.1	64.290.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.07	93.214.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90	38.862.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			46			46			46			89	75.280.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			37.8			37.8			37.8			60	16.662.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			85			85			85			99	91.418.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			21			21			21			30	53.077.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			55			55			55			78	287.679.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.01	566.090.000, 00
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			88.39			88.39			88.39			90.1	1.265.820.000, 00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			25			50			75			40	229.107.000, 00
18.	Jumlah desa pangan aman			25			50			75			12	709.226.000, 00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			25			50			75			4	106.703.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			22.75			45.5			68.25			100	124.983.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			22.75			45.5			68.25			100	128.343.500, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			22.5			45			67.5			91	694.906.000, 00
23.	Indeks RB UPT												84.9	176.396.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												80.1	34.297.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	11.527.161.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												76	7.241.188.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2			2	76.890.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			23.5			47			70.5			92.8	8.400.000, 00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			20.75			41.5			62.25			95	4.451.656.000, 00
Total														28.611.346.000, 00

Pontianak, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

2.8. Kriteria Pencapaian Indikator

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timeable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan

angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

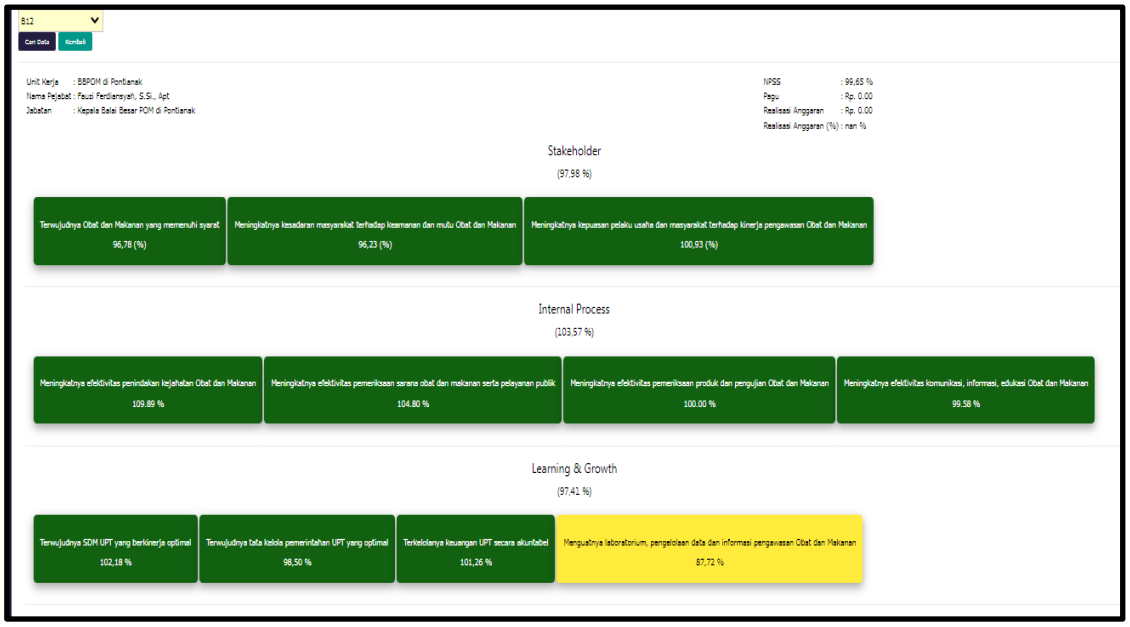
Tabel 2.8.1 Kriteria Pencapaian Indikator

Sangat Kurang	· Capaian Target Indikator <50%
Kurang	· Capaian Target Indikator 50%- <70%
Cukup	· Capaian Target Indikator 70%-<90%
Baik	· Capaian Target Indikator 90%-<110%
Sangat Baik	· Capaian Target Indikator 110%-120%
Tidak Dapat Disimpulkan	· Capaian Target Indikator >120%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2021 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2021. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (4) membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang setara; (5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan (8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.



Gambar 3.1.1. Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance

Berdasarkan aplikasi simetris pada menu e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Balai Besar POM di Pontianak, diperoleh nilai NPSS sebesar 99,65% dengan kriteria **BAIK**, terdiri dari NPS *Stakeholder Perspective* sebesar 97,98%, NPS *Internal Process Perspective* sebesar 103,57%, NPS *Learning and Growth Perspective* sebesar 97,41%.

Terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan pada tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai 10 (sepuluh) kriteria Baik, dan 1 (satu) kriteria Cukup, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	96,78%	**Baik**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	96,23%	**Baik**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,93%	**Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	104,79%	**Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	99,58%	**Baik**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,00%	**Baik**

	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	109,89%	**Baik**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	98,50%	**Baik**
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	102,18%	**Baik**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	87,72%	**Cukup**
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	101,26%	**Baik**

Bila dibandingkan dengan pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Palembang, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Jambi, maka diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Palembang	Capaian Balai POM di Batam	Capaian Balai POM di Jambi
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	96,78%	96,19%	100,88%	97,99%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	96,23%	94,41%	105,09%	103,39%
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,93%	96,64%	102,47%	105,64%
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	104,79%	105,17%	103,88%	91,82%

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Palembang	Capaian Balai POM di Batam	Capaian Balai POM di Jambi
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	99,58%	100,69%	100,50%	99,81%
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100%	98,88%	85,88%	99,08%
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	109,89%	119,01%	99,84%	95,29%
Learning & Growth	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	98,50%	98,58%	101,30%	98,93%
	9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	102,18%	99,69%	99,96%	97,39%

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Palembang	Capaian Balai POM di Batam	Capaian Balai POM di Jambi
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	87,72%	98,23%	84,01%	71,53%
	11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	101,26%	99,96%	102,32%	104,15%

Keterangan : **capaian tertinggi**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada *stakeholder perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan 3 Balai lain yang setara telah berhasil mencapai kriteria capaian **Baik** pada Sasaran Kegiatan pertama sampai Sasaran Kegiatan ketiga. Bisa dikatakan bahwa capaian Balai Besar POM di Pontianak pada *stakeholder perspective* dengan NPS sebesar 97,98% (Lampiran 3).

Pada *internal process perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan tiga Balai lain yang setara telah berhasil mencapai target Sasaran Kegiatan keempat sampai dengan Sasaran Kegiatan kelima dengan kriteria **Baik**, Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria **Cukup** dicapai oleh Balai POM di Batam, kriteria **Baik** dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang, dan Balai POM di Jambi serta Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **Sangat Baik** dicapai oleh BBPOM di Palembang dan kriteria **Baik** dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Batam. Secara umum, capaian Balai Besar POM di Pontianak pada perspektif *internal process* dengan NPS sebesar 103,57% (Lampiran 3).

Pada *learning and growth perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan tiga Balai lain yang setara telah berhasil mencapai target Sasaran Kegiatan kedelapan dan Sasaran Kegiatan kesembilan dengan kriteria **Baik,** Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan kriteria **Cukup** dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Batam, Balai POM di Jambi dan dengan kriteria **Baik** dicapai oleh Balai Besar POM di Palembang serta Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **Cukup** dicapai oleh Balai POM di Batam, dengan kriteria **Baik** dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang, dan Balai POM di Jambi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran *learning and growth perspective* dengan NPS Balai Besar POM di Pontianak sebesar 97,41% (Lampiran 3).

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak dan LOKA POM di Kabupaten Sanggau. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS 96,78% dengan kriteria Baik

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga

permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat

diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.3 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	88,00	86.02	97.75	Baik

Indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 86.02% berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 88,00%, dengan capaian sebesar 97.75% yang termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80,8	88,17	109,12	Baik
	2021	88,0	86.02	97.75	Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat lebih rendah daripada tahun 2020, namun masih termasuk dalam kategori "**Baik**" sama seperti tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

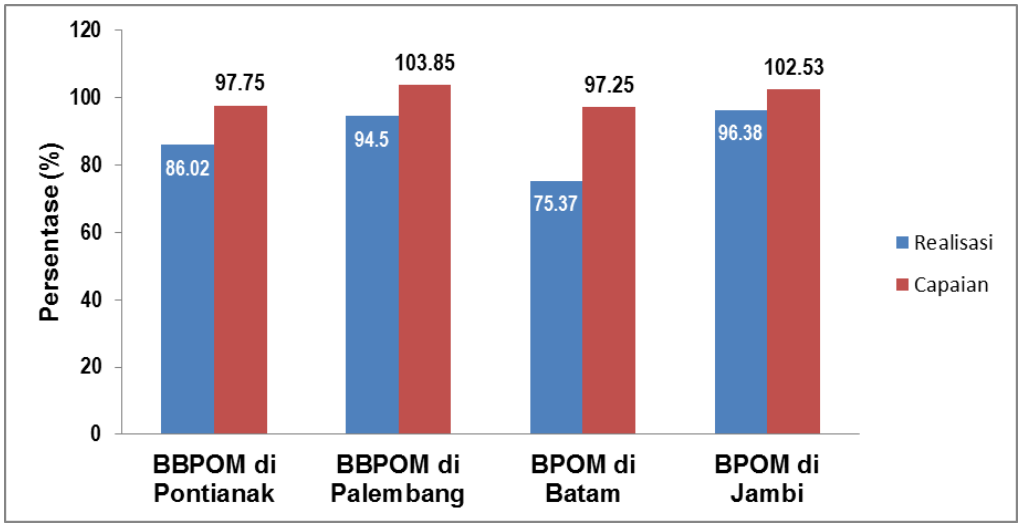
Indikator Kinerja	Target Tahun (%)	Realisasi Tahun (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	88,0	86.02	92,3

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 mencapai 86.02%, melampaui target 88,0%. Capaian Tahun 2021 sebesar 93,19 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Balai Besar POM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	Realisasi	86.02	94.50	75.37	96.38
	Capaian	97.75	103.85	97.25	102.53



Grafik 3.1.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Capaian indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak beserta 3 (dua) Balai pembanding lainnya (BBPOM di Pelembang, BPOM di Batam dan BPOM di Jambi) termasuk dalam kriteria **Baik**. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Capaian Balai Besar POM di Palembang paling tinggi dibanding Balai lain dan diikuti BPOM di Jambi, BBPOM di Pontianak dan BPOM di Batam.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sampling tetap dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan peningkatan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, peningkatan ruang lingkup pengujian, dan pengadaan serta pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan Obat yang memenuhi syarat.
- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait distribusi Obat di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian termasuk di daerah perbatasan antar negara.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat berada di Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2021, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 24 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Meskipun terdapat kesenjangan kebutuhan ABK, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,11 dengan

kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut :

a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2021
b. Penertiban terhadap produk Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan
c. Penilaian penandaan label terhadap kemasan produk Obat dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
d. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
e. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2020 berupa:

a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelatihan internal maupun eksternal berupa Bimbingan Teknis bagi penguji di laboratorium Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan, dan Mikrobiologi serta pelatihan eksternal untuk personel pemeriksaan.

b. Penambahan ruang lingkup parameter uji laboratorium obat 33 parameter, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11 parameter, Kosmetika 21 parameter, Pangan 4 parameter, dan Mikrobiologi 18 parameter.

c. *Refreshment* alat laboratorium

d. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* di daerah perbatasan.

e. Pendampingan dan Pembinaan bagi pelaku usaha yang intensif melalui program inovasi Agijakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).

SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.7 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00	82.68	103,35	Baik

Pada tahun 2021, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 82,68% berada di atas target (80,00%) dengan capaian sebesar 103,35%, termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2020	78,00	78,02	100,03	Baik
	2021	80.00	82.68	103,35	Baik

Terdapat kenaikan capaian pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pada tahun 2020, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi 100,03%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai realisasi 103,35%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.9 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00	82,68	86,00

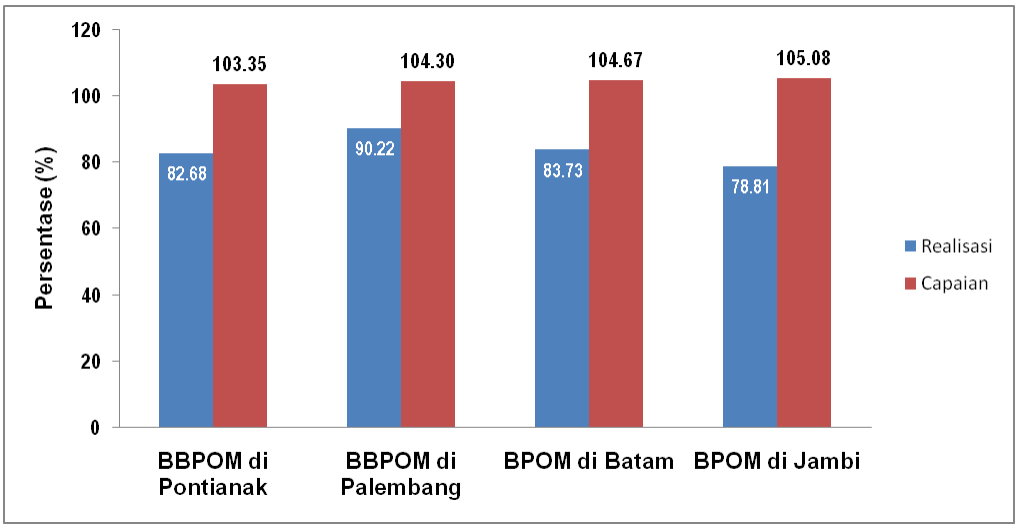
Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 mencapai 82,68% dengan target 80,00%. Capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 96,14% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Balai Besar POM di Pontianak

akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.10 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Realisasi	82,68	90.22	83.73	78.81
	Capaian	103,35	104.3	104.67	105.08



Grafik 3.1.2. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Capaian indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak masuk dalam kategori **Baik**. Untuk indikator ini BPOM di Jambi memiliki nilai capaian paling tinggi, disusul BPOM di Batam, Balai Besar POM di Palembang dan berikutnya BBPOM di Pontianak, masing-masing dengan kategori Baik.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sampling tetap dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan peningkatan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, peningkatan ruang lingkup pengujian, dan pengadaan serta pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan yang memenuhi syarat.

- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di sarana peredaran.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait sarana peredaran pangan termasuk di daerah perbatasan antar negara.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat berada di Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2021, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 24 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Meskipun terdapat kesenjangan kebutuhan ABK, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,11 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang

telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut :

g. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2021
h. Penertiban terhadap produk Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan
i. Penilaian penandaan label terhadap kemasan produk Obat dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
j. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
k. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
l. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.
m. Program yang mempengaruhi Kesadaran Pelaku usaha berupa Pendampingan kepada pelaku usaha yang intensif, adapun rincian kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha makanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
    - Pendampingan *on site* 7 sarana produksi;
    - Pendampingan dan bimtek 24 sarana produksi

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2020 berupa:

a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelatihan internal maupun eksternal berupa Bimbingan Teknis bagi laboratorium Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan, dan Mikrobiologi serta pelatihan eksternal untuk personel pemeriksaan.
b. Penambahan ruang lingkup parameter uji laboratorium obat 33 parameter, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11

parameter, Kosmetika 21 parameter, Pangan 4 parameter, dan Mikrobiologi 18 parameter.

c. *Refreshment* alat laboratorium.
d. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* di daerah perbatasan.
e. Pendampingan dan Pembinaan bagi pelaku usaha yang intensif melalui program inovasi Agijakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).

SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan Bermutu apabila diproduksi/didisitribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Targeted\ MS}{Total\ sampel\ Targetes\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86,00	68,49	79,64	Cukup

Pada tahun 2021, realisasi yang dicapai untuk Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 68,49% dengan capaian 79,64% terhadap target 86,00%. Berdasarkan data tersebut capaian terhadap indikator ini termasuk dalam kriteria **Cukup**. Capaian untuk indikator ini belum optimal dikarenakan banyaknya sampel produk Obat Tradisional dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji Tidak Memenuhi Syarat.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	94	82,81	88,10	Cukup
	2021	86	68,49	79,64	Cukup

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 88,10% dan capaian 2021 sebesar 79,64%. Capaian indikator tersebut masih dalam kategori yang sama yaitu cukup. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan intervensi dengan kajian yang mendalam untuk merumuskan kebijakan sehingga dapat meningkatkan capaian untuk indikator ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.13 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

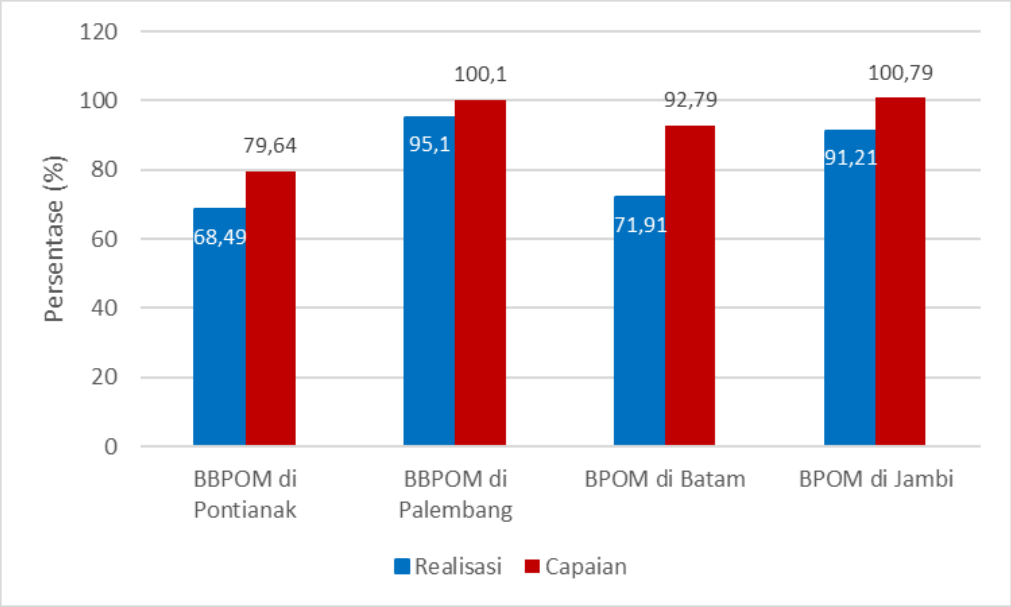
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	68,49	89,00

Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 sebesar 68,49% dari target 86%. Dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2020-2024, capaian Tahun 2021 sebesar 76,96%. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan/tantangan yang terjadi pada tahun 2021.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.14 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	68,49	95,10	71,91	91,21
	Capaian	79,64	100,10	92,79	100,79



Grafik 3.1.3. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Capaian Indikator Kinerja persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak masuk ke dalam kategori Cukup. Sedangkan capaian tiga Balai pembanding masuk ke dalam kategori Baik dengan capaian tertinggi diperoleh BPOM di Jambi disusul BBPOM di Palembang dan BPOM di Batam.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 hanya mencapai kategori cukup dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini didukung oleh kegiatan sampling dan pengujian yang terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sampling dapat memenuhi proporsi sesuai pedoman sampling dan pengujian terlaksana dengan baik, tidak melewati tahun anggaran.

Data pengawasan menunjukkan hasil Tidak Memenuhi Syarat disebabkan oleh label yang TMK sebesar 87 dari seluruh sampel Obat sejumlah 384 Adapun rincian keseluruhan jumlah sampel TMS per komoditi adalah :

1. Komoditi Obat Tradisional 55 sampel
2. Komoditi Kosmetik 51 sampel
3. Komoditi Suplemen Kesehatan 5 sampel
4. Komoditi Obat 9 sampel

Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat meliputi produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa, rusak, Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian. Realisasi Obat yang aman dan bermutu berada bawah target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Masih terdapat produsen Obat yang memproduksi Obat tidak sesuai dengan Cara Produksi Obat yang Baik/Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik/Cara Produksi Kosmetik yang Baik.
- Produsen Obat yang disampling secara *targeted* kurang memahami ketentuan penandaan (TMK penandaan/label);
- Produsen Obat memproduksi Obat dengan penandaan yang tidak sesuai dengan desain label yang telah disetujui ketika proses penilaian produk, antara lain : tidak mencantumkan nomor batch, alamat produsen (kota), tidak mencantumkan cara penyimpanan, peringatan/perhatian, komposisi yang berbeda dengan yang tertera dalam desain kemasan yang disetujui, tidak ada keterangan dalam bahasa Indonesia, sampel targeted pendaftaran UMKM belum memiliki penandaan yang lengkap terkait dengan Nomor Izin Edar.
- Sampel UMKM merupakan sampel yang sedang dalam proses penilaian untuk memperoleh Nomor Izin Edar, dan dilakukan pendampingan oleh BBPOM di Pontianak dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk tersebut. Sampel pendampingan UMKM tersebut tetap dievaluasi penandaan sehingga mempengaruhi jumlah TMK penandaan.

- Hasil evaluasi penandaan oleh pusat terhadap produk Obat yang TMK penandaan/label membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara ada kemungkinan perbedaan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak.
- Sanksi terhadap pelanggaran produk yang TMS/TMK tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain meningkatkan KIE kepada pelaku usaha, pembinaan, pendampingan dan pemberian sanksi yang tegas.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berada di Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 27 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Berdasarkan kondisi tersebut Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, dan penggalangan komitmen petugas. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yaitu sebesar 0,89 (Kurang Efisien berdasar Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian Balai Besar POM di Pontianak telah

melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pencapaian realisasi yang baik untuk indikator ini. Kegiatan tersebut antara lain :

a. Pemeriksaan dan pengujian sampel Obat *post market* yang dilaksanakan secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan pengujian 2021.
b. Pengawasan label/penandaan dan iklan sesuai pedoman dan melaporkan data tersebut ke Badan POM.
c. Pelaksanaan pengujian di laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015.
d. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat yang diproduksi dan beredar.
e. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Obat yang diproduksi dan beredar.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya antara lain :

1. Koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor, Organisasi Profesi, dan pelaku usaha.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetika.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan Obat.
4. Peningkatan kemampuan laboratorium melalui peningkatan Standar Ruang Lingkup, peningkatan kompetensi penguji, dan pengadaan alat laboratorium yang mendukung pengujian secara lebih efektif.

SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang

Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	,00	82,80	113.42	Sangat Baik

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” yaitu sebesar 113.42%, dengan realisasi (82,80%) berada di atas target (73,00%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	71	63,18	88,99	Cukup
	2021	73	82,80	113,.42	Sangat Baik

Dibandingkan tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.17 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021(%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	73,00	82,80	80,00

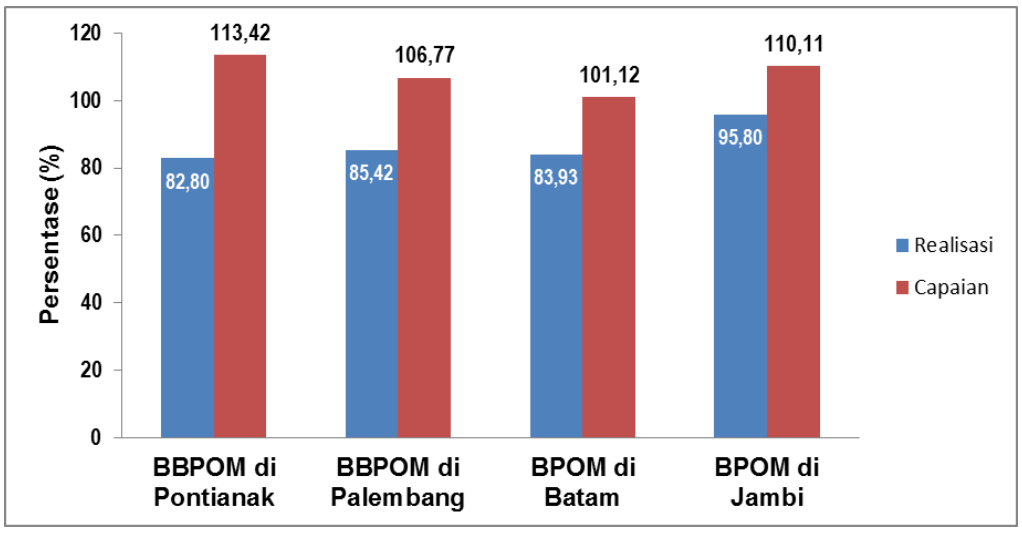
Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2021 sebesar 89,25% dari target 73,00%, dengan capaian sebesar 113,42% kriteria **Sangat Baik**. Capaian

Tahun 2021 sebesar 82,80% dari target 80% di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.18 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	82,80	85,42	83,93	95,80
	Capaian	113,42	106,77	101,12	110,11



Grafik 3.1.4. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah dibanding 3 (tiga) Balai pembanding lainnya (BBPOM di Palembang, BPOM di Batam, dan BPOM di Jambi). Capaian Balai Besar POM di Pontianak untuk indikator kinerja ini **Sangat Baik**, yang merupakan capaian tertinggi untuk indikator ini yaitu (113,42%), diikuti oleh BPOM di Jambi, BBPOM di Palembang dan terakhir BPOM di Batam.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mendapat kategori Sangat Baik. Realisasi yang dicapai jauh di atas target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sampling tetap dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan peningkatan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, peningkatan ruang lingkup pengujian, dan pengadaan serta pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan yang memenuhi syarat.

- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di sarana peredaran.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait sarana peredaran pangan termasuk di daerah perbatasan antar negara.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berada di Subkelompok Subtansi Inspeksi dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 27 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Meskipun terdapat kesenjangan kebutuhan ABK, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,1 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 antara lain :

a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2021

b. Penertiban terhadap produk Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
c. Penilaian penandaan label terhadap kemasan produk Makanan dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
d. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
e. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya antara lain :

Koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor, Organisasi Profesi, dan pelaku usaha. Pembinaan kepada pelaku usaha UMKM Makanan. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan Makanan. Peningkatan kemampuan laboratorium melalui peningkatan Standar Ruang Lingkup, peningkatan kompetensi penguji, dan pengadaan alat laboratorium yang mendukung pengujian secara lebih efektif.

SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan berfortifikasi yang beredar dengan metode sampling targetted. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai

ketentuan perundang undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targetted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi *targetted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Pangan\ fortifikasi\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{Total\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} x\ 100\%$$

Keterangan : Sumber data total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.19 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95,00	85.26	89,75	Cukup

Pada tahun 2021, untuk indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 85,26% berada di bawah target (95,00%) dengan capaian sebesar 89,75%, termasuk dalam kriteria **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, baru muncul pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Jadi hasil realisasi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.20 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

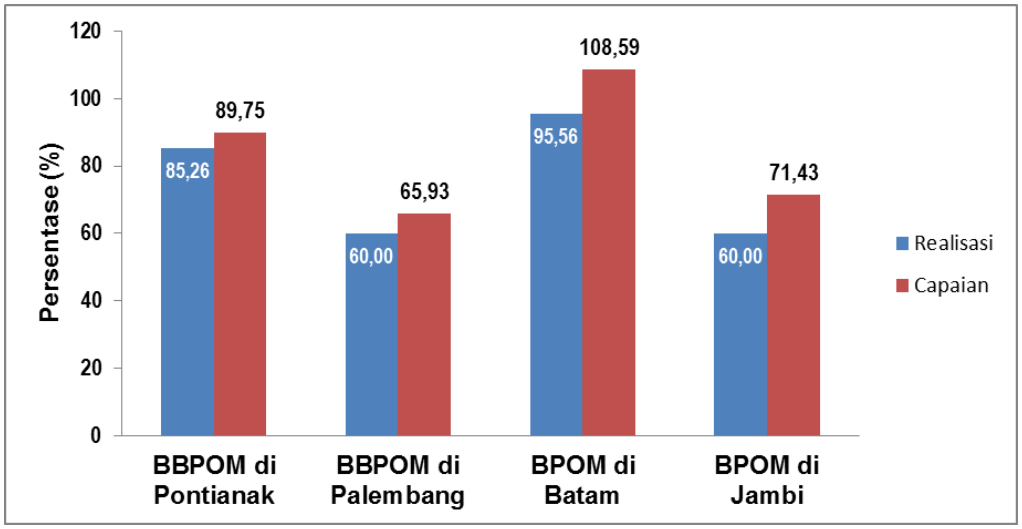
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95,00	85,26	99,00

Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2021 mencapai 85,26 % dengan target 95,00%. Capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 95,95% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Balai Besar POM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.21 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Realisasi	85,26	60,00	95,56	60,00
	Capaian	89,75	65,93	108,59	71,43



Grafik 3.1.5. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah dibanding BPOM di Batam dan lebih tinggi dari dua balai pembanding lainnya (BPOM di Jambi dan BBPOM di Palembang). Capaian Balai Besar POM di Pontianak untuk indikator kinerja ini **Cukup**, dengan niali capaian sebesar 89,75%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan salah satunya karena pelaksanaan fortifikasi wajib pada tepung terigu pada tahun 2020 sempat mengalami penundaan sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No. 5 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan Pada Tepung Terigu, pada periode 7 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat pengecualian sementara kewajiban penambahan fortifikan pada tepung terigu. Oleh karena itu, pada sebagian besar tepung terigu

yang diproduksi pada periode tersebut, produsen tidak menambahkan zat fortifikan pada produk. Berdasarkan data sampling pangan fortifikasi, produk tepung terigu yang disampling di peredaran pada tahun 2021 merupakan produk yang diproduksi pada tahun 2020. Oleh karena itu, persentase hasil pengujian tepung terigu yang memenuhi persyaratan fortifikasi menjadi menurun.

Adanya kebijakan relaksasi fortifikasi minyak goreng sawit yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020. Produksi minyak goreng sawit wajib memenuhi kandungan fortifikasi di sarana produksi per 1 Januari 2021.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berada di Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2021, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 24 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Meskipun terdapat kesenjangan kebutuhan ABK, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,11 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut :

a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2021
b. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
c. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, baru muncul pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Sehingga belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **96,23%** dengan kriteria **Baik**

SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

(1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.

(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1.22 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	≤ 45
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	≥ 90,01

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	81,00	77,95	96,23	Baik

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2021 adalah 77,95 termasuk dalam kriteria **Baik**. Perbandingan realisasi terhadap target indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat/*awareness index* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi 77,95 dari target 81,00 dengan persentase capaian 96,23%. Capaian indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.24 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	2020	70	80,54	115,05	Sangat Baik
	2021	81	77,95	96,23	Baik

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat adalah 80,54 dengan capaian 115,05%. Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2021 adalah 77,95 dengan capaian 96,23%. Terlihat penurunan Nilai indeks Kesadaran Masyarakat dibandingkan dengan Tahun 2020.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1.25 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	81,00	77,95	87,00

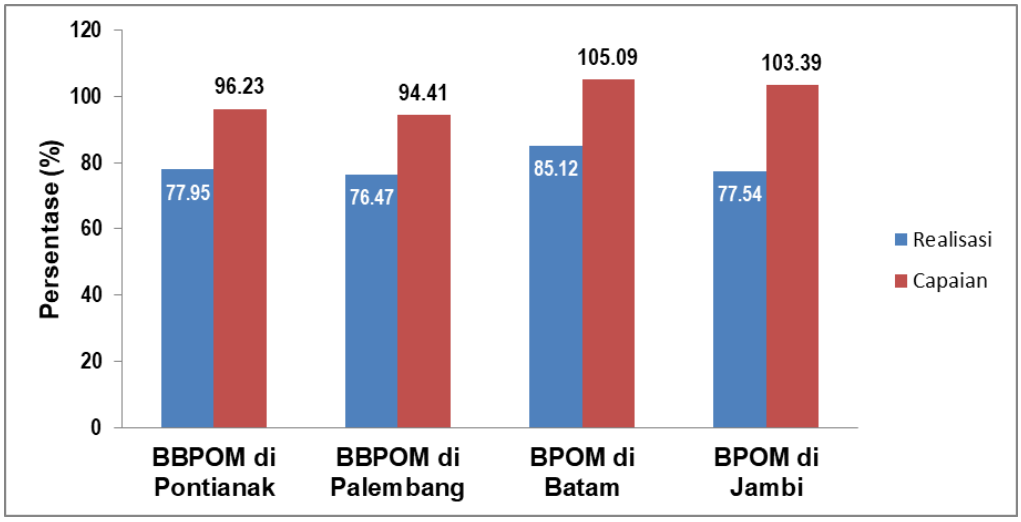
Realisasi indikator kinerja kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu Tahun 2021 mencapai 77,95. Capaian Tahun 2021 sebesar 89,60% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan tahun 2021 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.26 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Realisasi	77,95	76,47	85,12	77,54
	Capaian	96,23	94,41	105,09	103,39

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak dengan kriteria **Baik.** Capaian paling rendah diraih oleh BBPOM di Palembang. Capaian paling tinggi diraih oleh BPOM di Batam, capaian tertinggi kedua oleh BPOM di Jambi diikuti BBPOM di Pontianak.



Grafik 3.1.6. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab penurunan pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain sebagai berikut:

a) Sosialisasi kepada masyarakat yang kurang intens dan bervariasi. Sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyuluhan secara *offline* dan *online*, bimbingan teknis dan pameran. Variasi metode sosialisasi ini berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Di masa pandemi tahun 2021 terjadi penurunan kuantitas jenis sosialisasi baik yang dilakukan secara *offline* dan *online*.

b) Media informasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media informasi yang digunakan saat ini sudah cukup beragam yaitu berupa koran, radio, leaflet, videotron, spanduk, dan media sosial. Namun, kendala keterjangkauan daerah dan akses jaringan internet

yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan yang Aman.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Target kinerja Kelompok Substansi Infokom dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 0,96 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan masyarakat yang intensif, baik melalui *online* maupun *offline.*

2. Pemanfaatan berbagai media informasi, berupa media cetak, radio, *videotron*, baliho, leaflet, dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter,* dan *Youtube*).
3. Materi informasi Obat dan Makanan yang sesuai dengan sasaran kegiatan dan kondisi terkini.
4. Kerjasama dengan mitra kerja (DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat) yang terjalin dengan baik dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan.
5. Koordinasi dengan media/pers dalam peningkatan publikasi program/kegiatan kepada masyarakat.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020, capaian indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dilakukan dengan melakukan KIE dan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi secara intensif, baik secara *online* maupun *offline*. Adanya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Balai Besar POM di Pontianak (SIPONTI) yang mempermudah akses informasi dan pelayanan pengaduan bagi masyarakat

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan kepuasaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100,93%** dengan kriteria **Baik**

SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.27 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	91,00	99,89	Baik

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai 91,00%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu 91,10%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,89% sehingga termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	86,0	92,19	107,20	Baik
	2021	91,1	91,0	99,89	Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun

2021 mengalami penurunan sebesar 1,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 92,19% pada tahun 2020 menjadi 91,0% pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.29 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

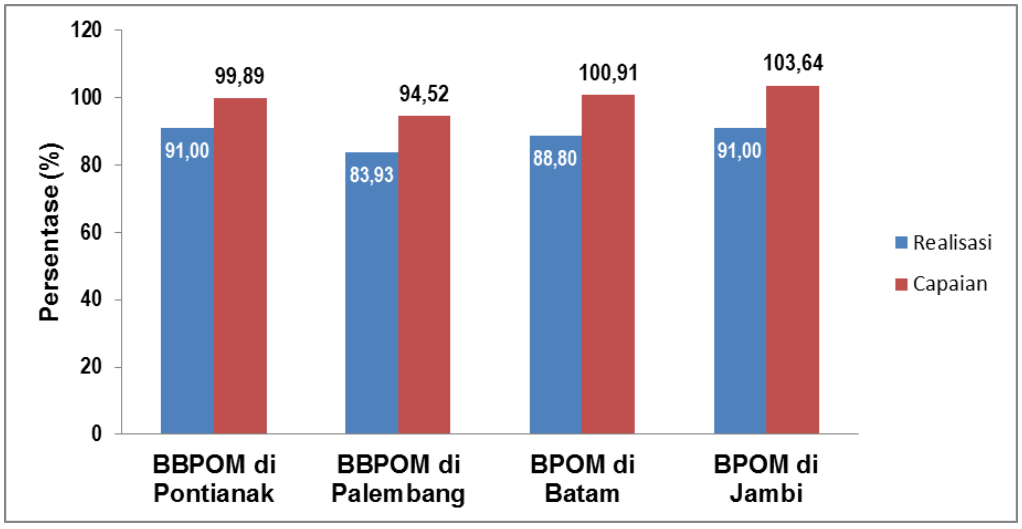
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	91,00	94,60

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 mencapai 91,0%. Persentase capaian tahun 2021 sebesar 96,19% dari target akhir Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya selalu memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 31.1 30 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	91,0	83,5	88,8	91,0
	Capaian	99,89	94,03	100,91	103,64



Grafik 3.1.7. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di

Pontianak dan 3 Balai pembanding lainnya untuk indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Baik**. Capaian tertinggi diperoleh BPOM di Jambi, diikuti BPOM di Batam, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Palembang.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

a) Bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
b) Pemberian pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
c) Dukungan Badan POM secara penuh terhadap peningkatan pertumbuhan pelaku usaha baru dengan kebijakan potongan biaya PNBP (pendaftaran) untuk UMK sebesar 50%.
d) Pelayanan informasi dan pengaduan yang responsif, informatif, dan solutif.
e) Petugas yang kompeten dan berintegritas.
f) Memberikan layanan pengujian laboratorium gratis untuk sarana produksi UMK dalam rangka registrasi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan berada di Subkelompok Substansi Sertifikasi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang PFM Ahli. Sumber daya manusia yang ada sebanyak 4 orang PFM Ahli di Subkelompok Substansi Sertifikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,0 **(Efisien)**, Hal ini didukung antara lain dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

a) Pembinaan langsung kepada pelaku usaha.
b) Sosialisasi, workshop/pelatihan, asistensi/ pendampingan, *Focus Group Discussion* (FGD).
c) Pendampingan penyelesaian CAPA (Corrective Action & Preventive Action).
d) Kegiatan konsultasi kepada pelaku usaha.
e) Layanan pengujian sampel pihak ketiga yang selalu sesuai SLA (*Service Level Agreement*).

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, yaitu secara konsisten dan intensif membangun komunikasi dengan para pelaku usaha dan melaksanakan program pembinaan serta pendampingan pelaku usaha.

SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks Kepuasan terhadap Kinerja BPOM atau bisa juga disebut sebagai Indeks Kepuasan Tak Langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan BPOM. Masing-masing produk terdiri atas 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu :

1. *Reliability* : kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan pemerintah/BPOM terhadap produk.
2. *Assurance* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.
3. *Responsiveness* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
4. *Empathy* : Kepuasan masyarakat atas perhatian pemerintah/BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Pengkategorian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.31 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

No.	Interval Indeks	Kategori
1.	≤ 45,00	Tidak Puas
2.	45,01 – 60,00	Kurang Puas
3.	60.01 – 75,00	Cukup Puas
4.	75.01 – 90,00	Puas
5.	≥ 90,01	Sangat Puas

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM, nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat tahun adalah 69,52 (**kategori Cukup Puas**).

Nilai indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 68,07 dengan nilai capaian indikator kinerja sebesar 102,13% sehingga termasuk dalam **kriteria Baik.**

Tabel 3.1.32 Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,07	69,52	102,13	Baik

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	2020	69,00	65,76	95,30	Baik
	2021	68,07	69,52	102,13	Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,76 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Namun demikian, capaian dalam indikator kinerja ini masih berada dalam kategori yang sama, yaitu kategori **Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.34 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

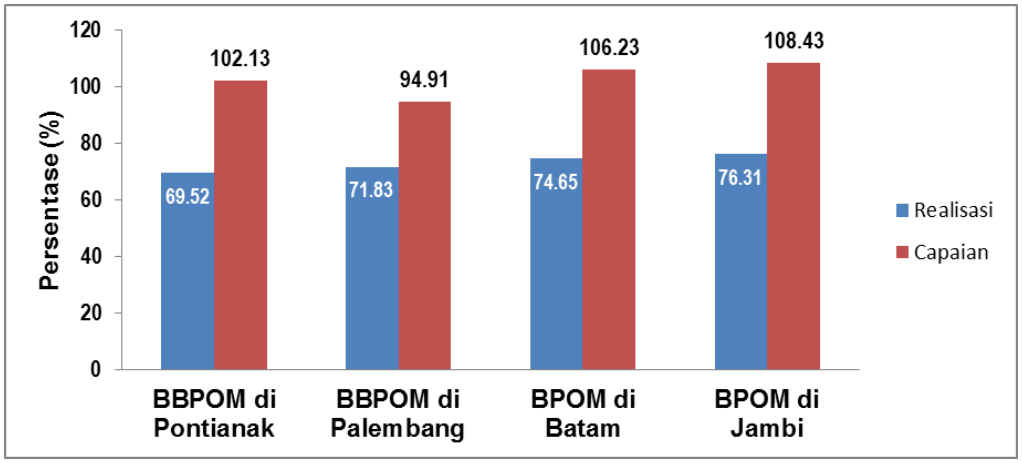
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,07	69,52	75,01

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 mencapai 69,52. Hal ini melampaui target sebesar 68,07. Persentase capaian tahun 2021 sebesar 92,68% dari target akhir Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.35 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	69.52	71.83	74.65	76.31
	Capaian	102.13	94.91	106.23	108.43



Grafik 3.1.8. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak memiliki kriteria **Baik**. Capaian tertinggi ditempati oleh BPOM di Jambi, disusul BPOM di Batam, kemudian BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Palembang.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai kategori Baik. Hal ini menunjukkan Balai Besar POM di Pontianak berhasil dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi hasil survei, nilai realisasi indeks kepuasan masyarakat 69,52 menunjukkan pada kategori Cukup Puas. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain :

- Informasi yang benar tentang Obat dan Makanan mudah diakses oleh masyarakat.
- Pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan direspon dan ditindaklanjuti oleh petugas.
- Pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta dan pemeriksaan secara intensif menjelang perayaan hari raya.
- Kompetensi petugas/inspektur dalam melakukan pengawasan produk yang beredar.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan berada di Kelompok Substansi Infokom dan Kelompok Substansi Pemeriksaan. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 22 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 15 orang PFM Ahli. Selain itu terdapat 3 orang CPNS, 1 orang PFM Penyelia dan 2 orang Fungsional Umum. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Dengan kondisi kesenjangan SDM yang cukup besar Balai Besar POM di Pontianak melakukan upaya yang sangat besar sehingga target tercapai. Efisiensi pemanfaatan SDM ini terutama didukung oleh kompetensi SDM yang memadai.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1 yang termasuk kategori **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Penyebaran informasi secara intensif melalui berbagai platform media sosial.
- KIE secara berkala melalui Media Cetak, Radio dan Televisi dengan topik yang up to date.
- KIE bersama Tokoh Masyarakat serta membagikan produk informasi yang variatif dan menarik.
- Pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.
- Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan.
- Petugas yang kompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, yaitu secara konsisten dan intensif melakukan kegiatan KIE dengan berbagai media dan metode, serta melakukan pengawasan secara rutin dan intensifikasi pada menjelang hari raya.

SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.36 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90	90,8	100,89	Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2021 adalah 90,8. Nilai ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2021, untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan realisasi 90,8 berada di atas target 90, dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,89%.

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	2020	89,5	89,32	99,80	Baik
	2021	90	90,7	100,78	Baik

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar 89,32 dengan capaian 99,80%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2021 sebesar 90,7 dengan capaian 100,78%. Terlihat peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dibandingkan dengan Tahun 2020. Capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Baik**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.39 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

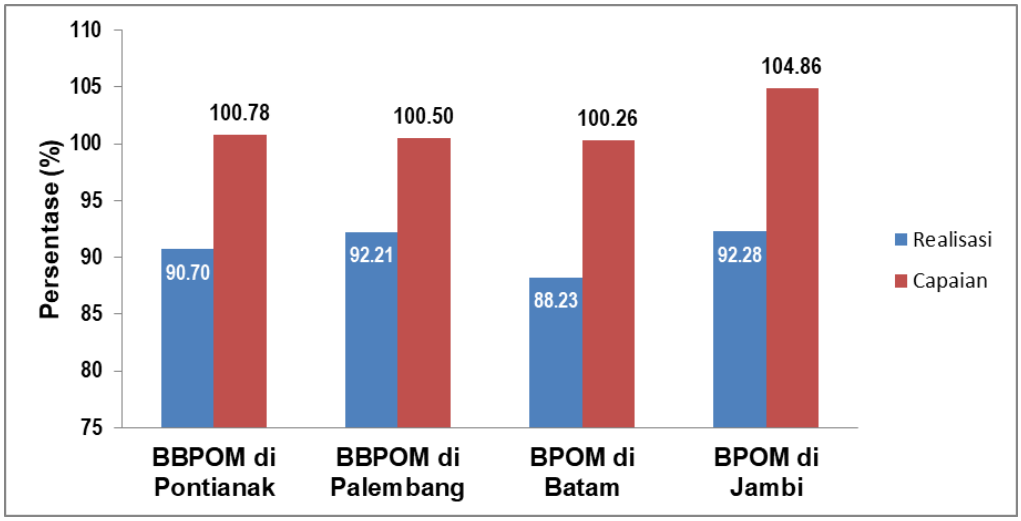
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90	90,7	92

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2021 mencapai 90,7 dari target 90. Capaian Tahun 2021 sebesar 98,59% di akhir tahun Renstra 2020-2024. Balai Besar POM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.40 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Realisasi	90,70	92,21	88,23	92,28
	Capaian	100,78	100,50	100,26	104,86



Grafik 3.1.9. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan Grafik diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak kriteria **Baik** dan berada pada urutan keempat setelah BBPOM di Jambi, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Batam.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penunjang keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

1) Petugas pelayanan publik yang kompeten, profesional, berintegritas, dan selalu responsif serta memberikan solusi.
2) Alur pelayanan yang jelas dan *timeline* yang pasti.
3) Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai PNBP.
4) Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, Wi-Fi, kantin kejujuran, *charging station*, Pojok Testimoni, Comic TV, dan area parkir.
5) Sikap petugas yang proaktif dalam memberikan pelayanan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom, Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Subkelompok Substansi Sertifikasi, dan Subkelompok Substansi Umum. Layanan publik dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik sebanyak 22 orang. Pembagian tugas dalam tim tersebut antara lain: penerima sampel, penguji sampel, petugas pelayanan informasi dan pengaduan, serta petugas layanan sertifikasi. Anggaran pelayanan publik dikelola oleh masing-masing kelompok/subkelompok substansi terkait secara proporsional.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Peningkatan kompetensi komunikasi dan *problem solving* petugas pelayanan publik.
- Perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan.
- Pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur pengujian sampel pihak ketiga dan pelayanan informasi / pengaduan melalui *whatsapp business* dan media sosial.
- Percepatan *timeline* pelayanan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2020 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL). Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan sosialisasi mengenai layanan publik melalui media sosial
- Renovasi ruang pelayanan publik lebih luas dan nyaman
- Layanan informasi dan pengaduan, layanan pengujian, dan layanan sertifikasi dapat dilakukan secara langsung melalui *Whatsapp business*
- Melakukan sosialisasi mengenai tarif PNBP pengujian melalui media sosial.

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **104,79%** dengan kriteria **Baik**

SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan (PSK) atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, distribusi, pelayanan, peredaran), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	99,72	112,04	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar

POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 99,72%. Realisasi ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 89,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 112,04% yang termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	46,00	87,67	190,59	Tidak dapat disimpulkan
	2021	89,00	99,72	112,04	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 87,67% pada tahun 2020 menjadi 99,72% pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3 .1.43 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Target 2024

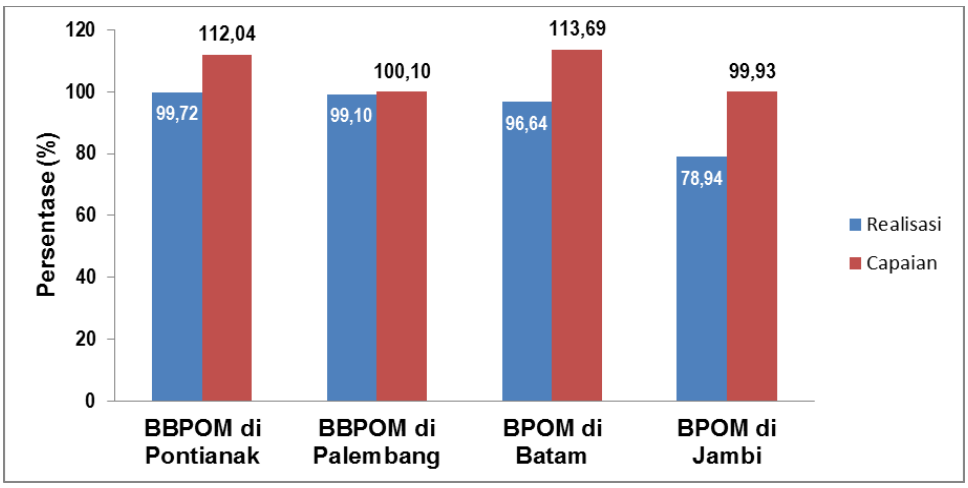
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	99,72	95,00

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 mencapai 99,72%. Persentase capaian tahun 2021 sebesar 104,97% dari target akhir Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya selalu memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 44 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi	99,72	99,10	96,64	78,94
	Capaian	112,04	100,10	113,69	99,93



Grafik 3.1. 10. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai POM di Batam paling tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya, diikuti oleh Balai Besar POM di Pontianak, selanjutnya Balai Besar POM di Palembang dan BPOM di Jambi.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung antara lain :

a. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pusat maupun lintas sektor terkait.
b. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi, baik yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Pontianak maupun yang diterbitkan oleh Pusat.
c. Hasil pengawasan telah dilengkapi dengan data dukung yang komprehensif dan sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Adanya peningkatan respon Badan POM terhadap hasil pengawasan yang dilaporkan oleh Balai Besar POM di Pontianak.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 15 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 6 orang PFM Ahli. Selain itu terdapat 1 orang PFM Penyelia, 1 orang Fungsional umum dan 2 orang CPNS sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan sebesar 1,1 **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 didukung oleh program/kegiatan antara lain :

a. Koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah secara intensif.
b. Meningkatkan koordinasi dengan kedeputian terkait tindak lanjut hasil pengawasan.
c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pedoman tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Meningkatkan respon petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat/UPT lain.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020 berupa monitoring dan evaluasi kinerja, meningkatkan koordinasi dengan kedeputian maupun lintas sektor terkait, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan respon petugas terhadap tindak lanjut hasil inspeksi.

SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	70,37	117,28	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 mencapai 70,37%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 60,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 117,28% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.46 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	28,7	31,7	110,45	Sangat Baik
	2021	60,00	70,37	117,28	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 31,7% pada tahun 2020 menjadi 70,37% pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.47 Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

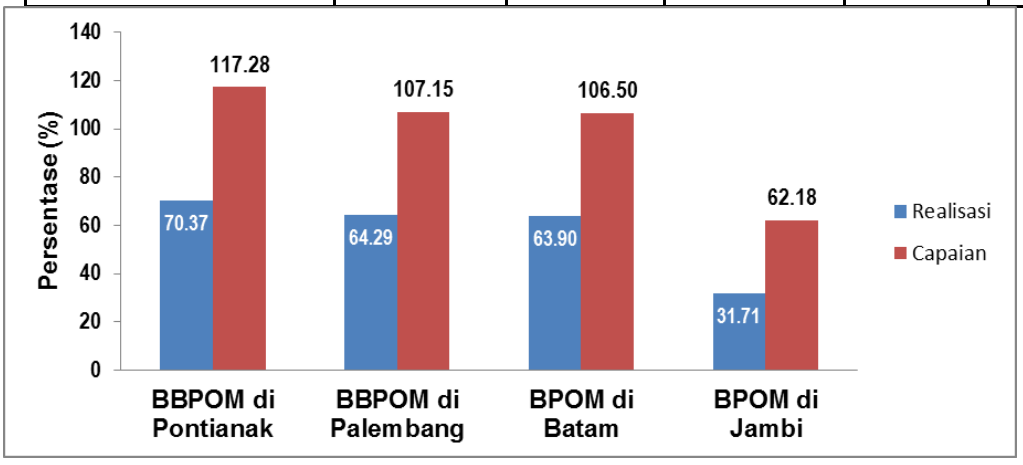
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	70,37	75.00

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 mencapai 70,37%. Persentase tahun 2021 sebesar 93,83 % dari target akhir Renstra 2020-2004. Perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan realisasi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.48 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Realisasi	70,37	64.29	63.90	31.71
	Capaian	117,28	107.15	106.50	62.18



Grafik 3.1.11. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Pontianak paling tinggi dibandingkan dengan capaian BBPOM di Palembang, BPOM di Batam dan BPOM di Jambi.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan didukung oleh :

a. Respon positif dari pelaku usaha menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan melalui pelaporan *Corrective Action and Preventive Action (CAPA).*
b. Petugas yang kompeten dan responsif dalam memberikan konsultasi teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan *Corrective Action and Preventive Action (CAPA).*
c. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menyampaikan *Corrective Action and Preventive Action (CAPA).*
d. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.
e. Adanya peningkatan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil inspeksi sebelumnya.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 15 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 6 orang PFM Ahli. Selain itu terdapat 1 orang PFM Penyelia, 1 orang Fungsional umum

dan 2 orang CPNS sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan sebesar 1,2 **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan didukung oleh program/kegiatan antara lain :

a. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah secara intensif untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah serta menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.
b. Pelaksanaan DAK Non Fisik yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan.
c. Upaya persuasif petugas kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dan pelaporan CAPA.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020 berupa sosialisasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait kewajiban pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Penegasan peningkatan sanksi administratif yang dicantumkan pada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.

SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

a. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
c. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
d. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
e. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
f. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
g. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
h. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikat yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut : Persentase Keputusan Penilaian Sertifikat yang Diselesaikan Tepat Waktu = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi/Jumlah permohonan penilaian×100%.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.49 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	99,79	100,80	Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 sebesar 99,79%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,80% sehingga termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.50 Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	99,38	116,92	Sangat Baik
	2021	99	99,79	100,80	Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,41%. Capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.51 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun 2024

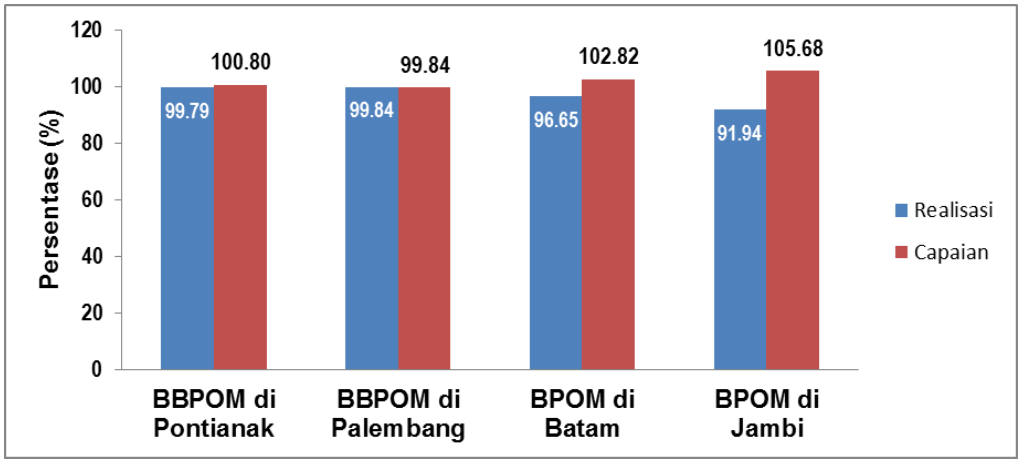
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	99,79	100,00

Realisasi Indikator Kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 mencapai 99,79%. Persentase capaian 2021 sebesar 99,79% dari target akhir Renstra 2020-2024. Perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan realisasi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.52 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	99,79	99.84	96.65	91.94
	Capaian	100,80	99.84	102.82	105.68



Grafik 3.1.12. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak mencapai kriteria **Baik.** Capaian paling tinggi yaitu BPOM di Jambi, diikuti BPOM di Batam, BBPOM di Pontianak, dan selanjutnya BBPOM di Palembang.

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan kinerja dari target Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu didukung antara lain:

a. Tingkat pemahaman pelaku usaha semakin baik sebagai hasil bimbingan teknis yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak terkait pendaftaran produk semakin baik.
b. Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran produk.
c. Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-registration* yang mudah diakses.
d. Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya, serta timeline yang pasti.
e. Inovasi Agi Jakk (Aksi dampingi dan Jangkau UMKM Kalimantan Barat) dan kemudahan dalam proses pendaftaran izin edar produk melalui program pendampingan pelaku UMKM.

f. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan hasil pengujian sampel pihak ke-3 (NAPZA) sesuai timeline melalui program Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam).
g. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder.*

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu berada di Subkelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Substansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang PFM Ahli di Subkelompok Substansi Sertifikasi dan 43 orang PFM Ahli di Kelompok Substansi Pengujian. Sumber daya manusia yang ada sebanyak 4 orang PFM Ahli di Subkelompok Substansi Sertifikasi dan sebanyak 18 orang PFM Ahli di Kelompok Substansi Pengujian. Namun pada proses pengujian sampel pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis sampel yang diuji, sehingga sumber daya manusia yang ada masih memadai untuk melaksanakan target pengujian tersebut.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 1,01 **yang termasuk kriteria Efisien.** Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
b. Bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
c. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (Evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
d. Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) dalam rangka sertifikasi secara *online* terutama pada kondisi pandemi Covid-19.
e. Sosialisasi yang masif tentang pelayanan publik di berbagai media.
f. Inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga.
g. Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) meliputi: Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian, peralatan laboratorium dan kompetensi penguji.

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Telah dilakukan rekomendasi hasil evaluasi capaian sebelumnya berupa kegiatan Sosialisasi dan *Desk* Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan, Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik/Obat Tradisional, monitoring dan evaluasi waktu pelaksanaan pengujian yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian sampel pihak ketiga, sehingga telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keputusan penilaian sertifikasi diselesaikan tepat waktu.

SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.1.53 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00	29,66	98,96	Baik

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai 29,66%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu 30,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,96% sehingga termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1.54 Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	20	26,56	132,80	Tidak Dapat Disimpulkan
	2021	30	29,69	98,96	Baik

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu dari 26,56% pada tahun 2020 menjadi sebesar 29,69% pada tahun 2021.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.1.55 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2024

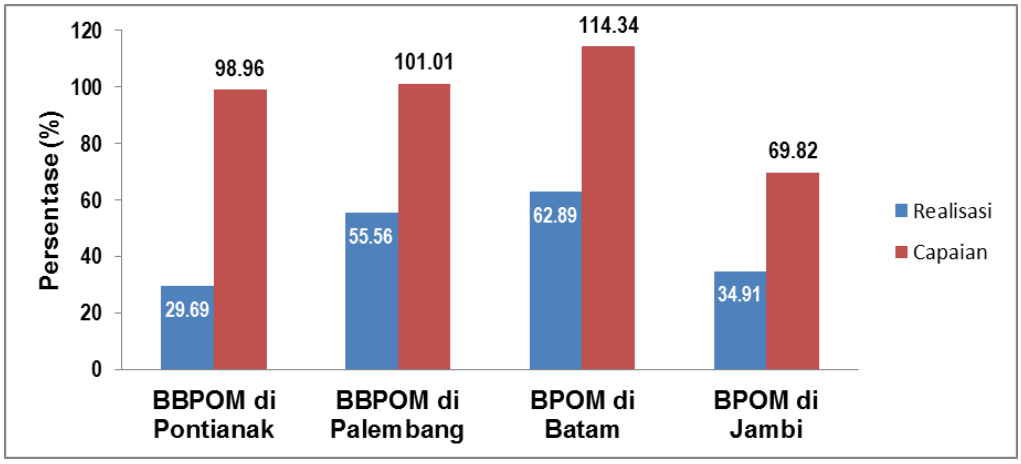
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00	29,69	60,00

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2021 mencapai 29,69%. Persentase capaian tahun 2021 sebesar 49,48% dari target akhir Renstra 2020-2024. Capaian tersebut perlu ditingkatkan secara signifikan agar target akhir Renstra 2020-2024 dapat tercapai.

4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.56 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	29,69	55.56	62.89	34.91
	Capaian	98,96	101.01	114.34	69.82



Grafik 3.1.16. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak mencapai kriteria **Baik**. Capaian ini tertinggi diperoleh BPOM di Batam, diikuti oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Pontianak dan BPOM di Jambi.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan didukung oleh :

a. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang efektif.
b. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang menjangkau semua level pelaku usaha.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.
d. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi berbasis kajian resiko
e. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pendampingan dan pembinaan terhadap sarana produksi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 15 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 6 orang PFM Ahli. Selain itu terdapat 1 orang PFM Penyelia, 1 orang Fungsional umum dan 2 orang CPNS sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 1 yang termasuk kategori **Efisien**. Hal ini didukung

oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Pelaksanaan KIE yang efektif dan efisien sehingga kesadaran pelaku usaha meningkat.
2. Program pendampingan dan komunikasi intensif untuk memberikan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha sarana produksi pangan olahan.
4. Peningkatan kompetensi petugas/inspektur terkait pendampingan pelaku usaha sarana produksi.
5. Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, yaitu pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi, meningkatkan komunikasi yang efektif kepada pemerintah daerah terkait pemanfaatan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan kompetensi petugas/inspektur.

SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.1.57 Perbandingan dan Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	73,08	93,69	Baik

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 sebesar 73,08%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu 78,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 93,69% yang termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1.58 Perbandingan pencapaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55	78,01	141,84	Tidak Dapat Disimpulkan
	2021	78,00	73,08	93,69	Baik

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi sebesar

4,93% bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 78,01% pada tahun 2020 menjadi 73,08% pada tahun 2021.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.1.59 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2024

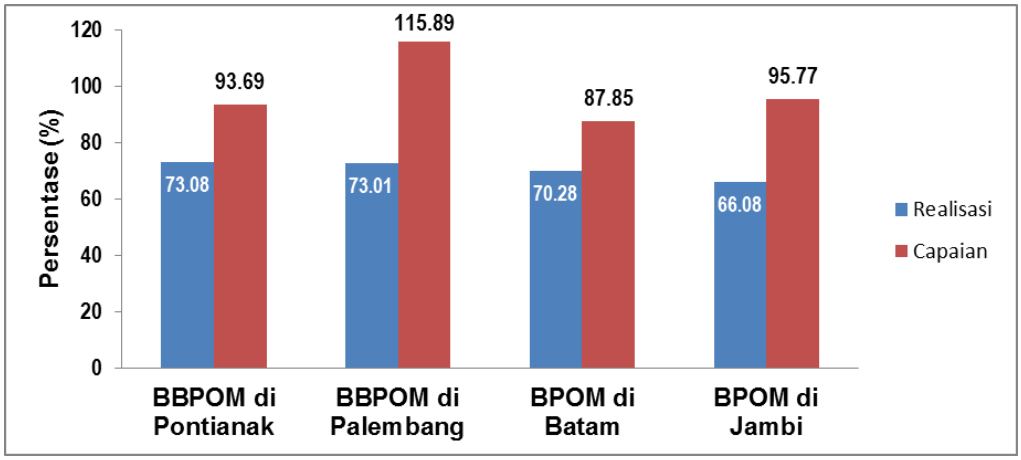
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	73,08	85,00

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 mencapai 73,08%. Persentase realisasi tahun 2021 sebesar 85,98% dari target akhir Renstra 2020-2024. Realisasi tersebut perlu ditingkatkan agar target akhir Renstra 2020-2024 dapat tercapai.

4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding.

Tabel 3.1.60 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	73.08	73.01	70.28	66.08
	Capaian	93.69	115.89	87.85	95.77



Grafik 3.1.13. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak memiliki kriteria **Baik**. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Palembang, diikuti oleh BPOM di Jambi, BBPOM di Pontianak, dan BPOM di Batam.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

a) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang efektif.
b) Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang menjangkau semua level pelaku usaha.
c) Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.
d) Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi berbasis kajian resiko
e) Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pendampingan dan pembinaan terhadap sarana distribusi.
f) Kepatuhan pelaku usaha yang semakin baik terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.

Analisis hambatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

a) Maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar disarana perawatan kecantikan (salon) yang produknya diperoleh pelaku usaha secara online (daring).
b) Maraknya penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di sarana peredaran pangan yang tidak memiliki kewenangan.
c) Sebagian besar Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab Toko Obat tidak melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan waktu praktek yang tercantum dalam surat izin praktek.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 15 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 6 orang PFM Ahli. Selain itu terdapat 1 orang PFM Penyelia, 1 orang Fungsional umum dan 2 orang CPNS sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0,94 yang termasuk kategori **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing

level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a) Pengawasan secara berkelanjutan dan pemberian sanksi secara konsisten.
b) Pembinaan langsung yang dilakukan oleh petugas pada saat pengawasan
c) Penyebaran informasi melalui berbagai media terkait regulasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
d) Sosialisasi tentang peraturan di bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan *stakeholder*.
e) Program pendampingan dan komunikasi intensif untuk memberikan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.
f) Peningkatan kompetensi petugas/inspektur terkait pendampingan pelaku usaha sarana distribusi.

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, yaitu pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha sarana distribusi, meningkatkan komunikasi yang efektif kepada pemerintah daerah terkait pembinaan sarana distribusi dan peningkatan kompetensi petugas/inspektur.

SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.61 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,01	4,25	105,99	Baik

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak adalah 4,25 terhadap target 4,01 dengan persentase capaian sebesar 105,99 %. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria "**Baik**".

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1.62 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	2020	3,51	3,83	109,17	Baik
	2021	4,01	4,25	105,99	Baik

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak sebesar 3,83 dengan capaian 109,17%. Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 4,25 dengan capaian 105,99%. Capaian dalam indikator kinerja ini masih berada dalam kategori **Baik**

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Tabel 3.1.63 Perbandingan Persentase Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Tahun 2024

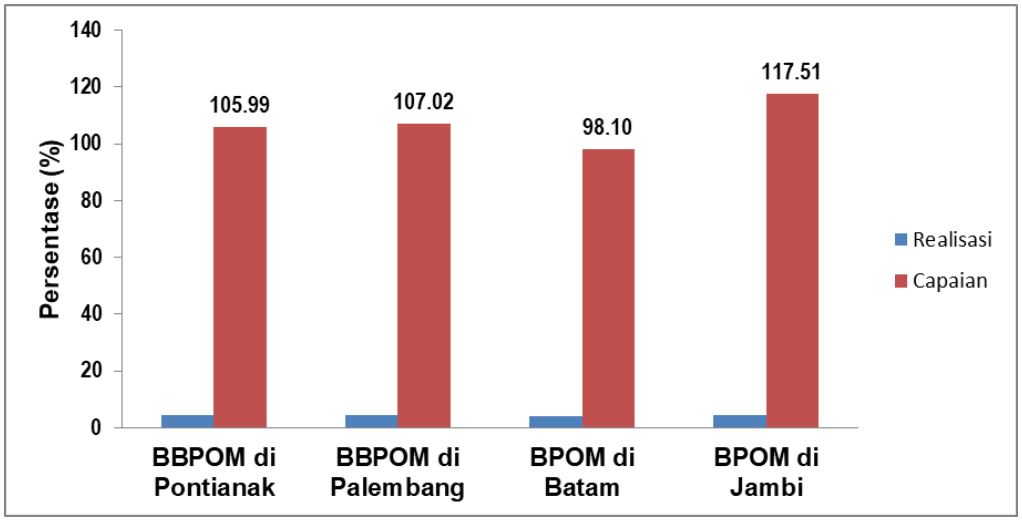
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks Pelayanan Publik	4,01	4,25	4,51

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 mencapai 4,25 melebihi target 4,01. Capaian tahun 2021 sebesar 94,23% dari target 4,51 pada tahun 2024.

4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.63 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	Realisasi	4,25	4,27	4,12	4,43
	Capaian	105,99	107,02	98,10	117,51



Grafik 3.1.14. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik** sama seperti BBPOM Palembang dan BPOM Batam sedangkan BPOM Jambi termasuk kriteria **Sangat Baik**.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penunjang keberhasilan dalam indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh dari sikap petugas pada saat melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat. Dengan demikian semakin banyaknya petugas yang mendapat pelatihan pelayanan publik membuat petugas makin kompeten di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

b) Empati untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat. Sifat empati dan peduli petugas ULPK yang semakin meningkat membuat masyarakat bebas menginformasikan keluhan yang dirasakan tentang obat dan makanan.

c) Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, Wi-Fi,

kantin kejujuran, *charging station*, Pojok Testimoni, Comic TV, dan area parkir .

d) Pemutakhiran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial secara intensif.
e) Inovasi penggunaan Sistem Informasi dan Pengaduan Cepat Melayani Konsumen (SIMPATIK) Balai Besar POM di Pontianak dalam memudahkan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
f) Alur pelayanan yang jelas dengan *timeline* yang pasti.
g) Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai PNBP.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom, Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Subkelompok Substansi Sertifikasi, dan Subkelompok Substansi Umum. Layanan publik dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik sebanyak 22 orang. Pembagian tugas dalam tim tersebut antara lain: penerima sampel, penguji sampel, petugas pelayanan informasi dan pengaduan, serta petugas layanan sertifikasi. Anggaran pelayanan publik dikelola oleh masing-masing kelompok/subkelompok substansi terkait secara proporsional..

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indeks pelayanan publik sebesar 1,06 yang termasuk kriteria Efisien (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam **Indeks Pelayanan Publik** di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

1. Peningkatan kompetensi dan sikap pelayanan publik yang baik
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan
3. Alur pelayanan yang jelas, *timeline* yang pasti dan biaya yang transparan.
4. Pelaksanaan pelayanan publik diluar jam kerja, termasuk pelayanan pengujian sampel NAPZA pihak ketiga pada hari libur.
5. Media komunikasi yang semakin beragam dengan menggunakan berbagai *platform,* yaitu *Whatsapp business*, *subsite,* dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter,* dan *Youtube*)

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Unit Pelayanan Publik, berupa:

- Pengadaan sistem antrian elektronik untuk masing-masing layanan: informasi dan pengaduan, pengujian sampel pihak ketiga, dan penerbitan SKI/SKE.
- Penyediaan toilet bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus.
- Meningkatkan pemutakhiran informasi pelayanan publik secara terus menerus setiap hari.
- Menyediakan sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **99,58%** dengan kriteria **Baik**

SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1.64 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	≤ 65.00
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.65 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,1	88,58	98,31	Baik

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2021 sebesar 88,58 dengan kategori Sangat Efektif. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 88,58 dibawah target 90,1 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 98,31 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.66 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	72,0	88,85	102,52	Baik
	2021	90,1	88,58	98,31	Baik

Nilai Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 sebesar 88,58 terhadap target 90,1 dengan capaian 98,31%. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 sebesar 88,85

terhadap target 72 dengan capaian 102,52%. Capaian indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 terlihat menurun, tetapi masih termasuk dalam kriteria **Baik.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.67 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,1	88,58	95,6

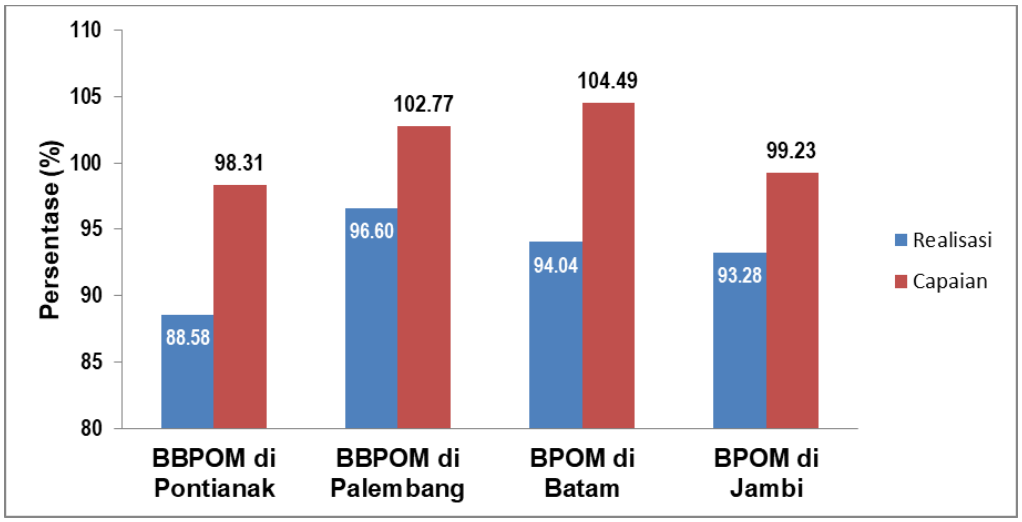
Realisasi indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 mencapai 88,58. Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 sebesar 95,6. Perbandingan persentase realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 92,66 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.68 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Realisasi	88,58	96,6	94,04	93,28
	Capaian	98,31	102,77	104,49	99,23

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak paling rendah dibanding dengan tiga Balai lainnya tetapi masih dalam kriteria **Baik.**



Grafik 3.1.15. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. KIE yang menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Kesadaran dan antusiasme masyarakat yang baik terhadap informasi Obat dan Makanan.

6. KIE yang dilaksanakan bersama mitra kerja terdapat survei lain yang juga dilaksanakan oleh mitra kerja sehingga terdapat dua survei pada satu kegiatan yang membuat peserta tidak fokus dalam pengisian Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

- Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Penyuluhan dilakukan secara luring dan daring.
- Pemasangan spanduk edukasi pada sarana ritel menjelang Hari Raya Keagamaan.
- Pemberitaan dalam bentuk artikel atau advertorial melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet) dan *videotron*.
- KIE melalui *subsite* Balai Besar POM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id)
- KIE melalui media sosial antara lain *Twitter, Facebook, Instagram,* dan *Youtube.*
- *Talkshow* melalui radio.
- KIE dan pemberian produk informasi kepada masyarakat pada kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (anggota Komisi IX DPR RI).
- KIE di wilayah perbatasan melalui *helpdesk* di PLBN Aruk tetap berjalan walaupun kondisi *lockdown* di masa pandemi COVID-19.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang

PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya. Sumberdaya yang melakukan kegiatan KIE di wilayah perbatasan sebanyak 3 orang. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Target kinerja Kelompok Substansi Infokom dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 0,98 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020, capaian indikator Tingkat Efektifitas KIE dilakukan dengan melakukan KIE dan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi secara intensif, baik secara luring maupun daring. Adanya pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Pengaduan Cepat Melayani Konsumen (SIMPATIK) yang mempermudah akses informasi dan pelayanan pengaduan bagi masyarakat

SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 3.1.69 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan JajananYang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	40,00	40,00	100,00	Baik

Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2021 sebanyak 40 sekolah. Jumlah ini sesuai dengan target 40 sekolah. Persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.70 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2020 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	2020	16	16	100	Baik

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS)	2021	40	40	100	Baik

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 mencapai 40 dengan capaian 100%. Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 mencapai 16 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria **Baik**.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1.71 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	40	40	106

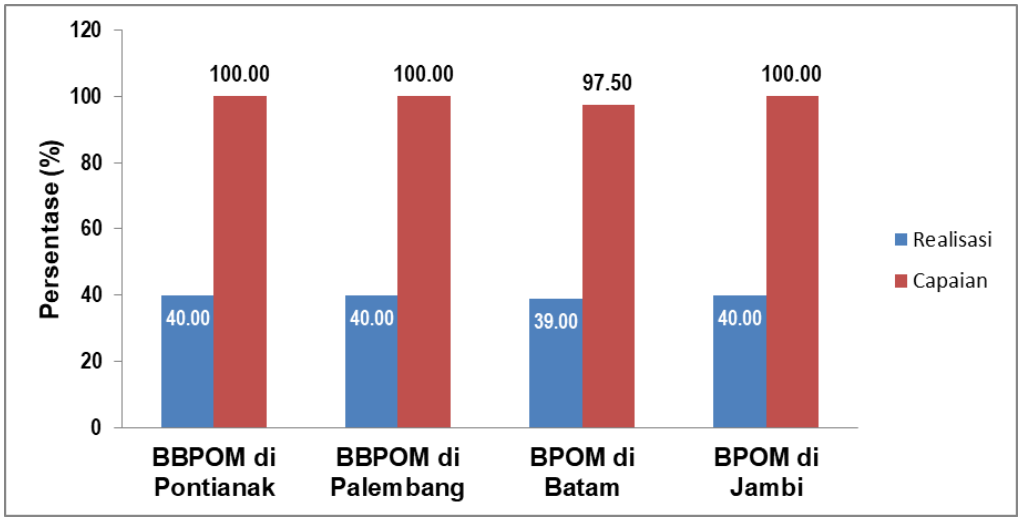
Realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021 mencapai 40, hal ini sama dengan target, sehingga capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 38,46 % dari target tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.72. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	Realisasi	40,00	40,00	39,00	40,00
	Capaian	100,00	100,00	97,50	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** ini sama dengan Balai Besar POM di Palembang, BPOM di Batam dan BPOM di Jambi.



Grafik 3.1.16. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pihak Sekolah).
- Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah terutama kader melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Antusias komunitas sekolah (siswa, guru, dan orang tua) dalam mengikuti kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan secara daring dan luring terhadap siswa dan guru dari 40 (empat puluh) sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang sudah ditetapkan dalam program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring dan luring diikuti oleh siswa, guru, dan pengelola kantin dari 59 sekolah
- Pembagian paket edukasi kepada 40 sekolah, terdiri dari 24 sekolah intervensi tahun 2021 dan 16 sekolah intervensi tahun 2020.
- Pendampingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan kepada komunitas sekolah, termasuk pedagang di sekitar sekolah.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Target kinerja Kelompok Substansi Infokom dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebesar 1,00 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Pada tahun 2021, terdapat penambahan parameter uji mikrobiologi terhadap beberapa sampel pangan minuman yang mengandung es dan produk olahan daging (bakso, pentol, siomay). Program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) masih dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal Tahun 2021. Advokasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menyediakan kantin sekolah yang memadai.

SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 3.1.73. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	12	12	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 sebanyak 12 desa. Jumlah ini sesuai dengan target 12 desa dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.74 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2020	4	4	100	Baik
	2021	12	12	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 mencapai 12 dengan capaian 100%. Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak tahun

2020 mencapai 4 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria **Baik**.

3) Pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.1.75. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024 (%)
Jumlah desa pangan aman	12	12	32

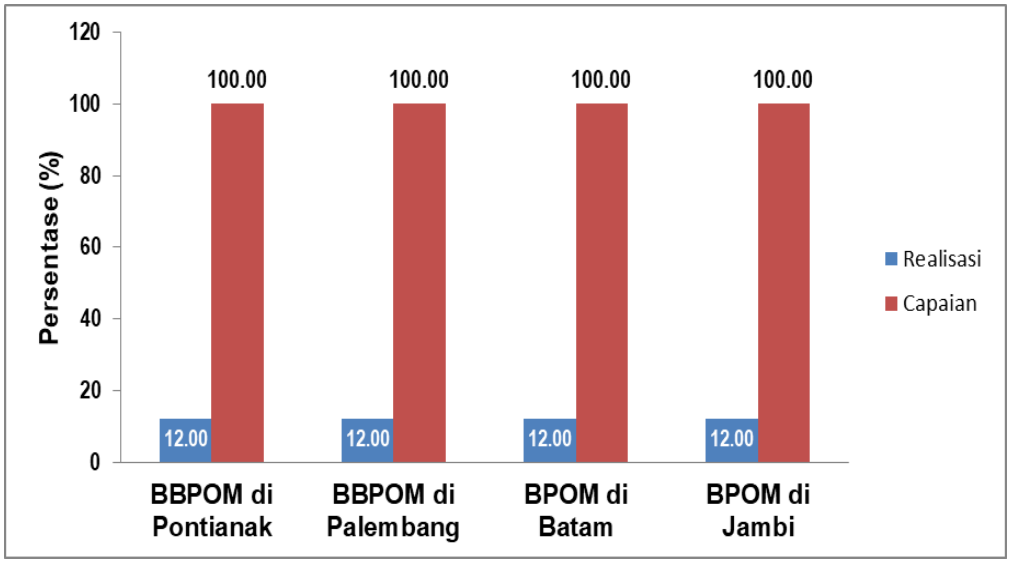
Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021 mencapai 12 desa. Capaian Tahun 2021 sebesar 37,50% dari target 32 desa di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.76. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Jumlah desa pangan aman	Realisasi	12,00	12,00	12,00	12,00
	Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja. Jumlah desa pangan aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.17. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik** sama dengan Balai pembanding lainnya.

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Pihak Desa)
- Dukungan dari pemerintah daerah terhadap program Desa Pangan Aman di wilayahnya.

- Komitmen yang tinggi dari pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 12 (dua belas) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa yang diintervensi menjadi desa pangan aman yang mandiri.

- Program Pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat desa seperti Sungai Duri Food Center (SDFC), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD), BUMDes Gula Aren.

- Pemanfaatan APBDes dalam melaksanakan program Keamanan Pangan di desa

- Sinkronisasi program Keamanan Pangan dengan program di Desa, antara lain penanganan *stunting*, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Desa Siaga, Posyandu, PKK, Posbindu Remaja.

- Pemberian paket edukasi keamanan pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan jumlah desa pangan aman yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom . Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli

Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Target kinerja Kelompok Substansi Infokom dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 1,00 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Program Desa Pangan Aman masih dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Program Keamanan Pangan diharapkan bisa masuk ke dalam APBDes tahun 2022.

SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 3.1.77 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.78 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2020	2	2	100	Baik
	2021	4	4	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 sebanyak 4 pasar dengan capaian 100%. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 sebanyak 2 pasar dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria **Baik**.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1.79. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	13

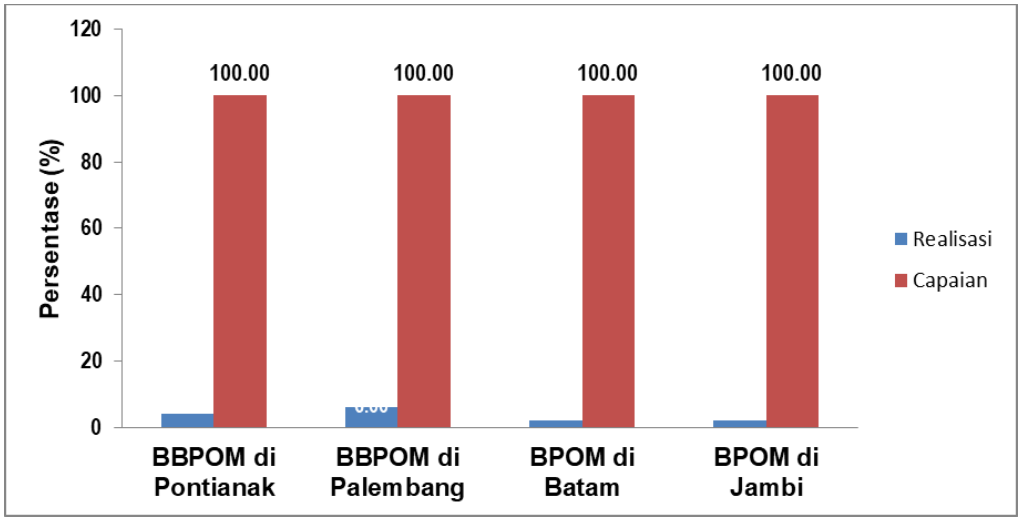
Pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan target sebanyak 4 pasar. Capaian tahun 2021 sebesar 30,77% dari target 13 pasar di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.80 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Realisasi	4,00	6,00	2,00	2,00
	Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.18. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar)
- Dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.
- Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Kesadaran pedagang pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di komunitas pasar.

6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Petugas pengawas pasar terhadap 4 (empat) pasar yang masuk dalam target intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 4 (empat) pasar berupa pembagian produk informasi kepada komunitas pasar.
- Penyuluhan kepada komunitas pasar terhadap 4 (pasar) pasar yang masuk dalam target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berupa sampling dan pengujian pangan dan bahan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, baik uji kimia maupun uji mikrobiologi.
- Pemberian produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1

orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Target kinerja Kelompok Substansi Infokom dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 1,00, yang termsuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2021, terdapat penambahan parameter uji mikrobiologi terhadap beberapa sampel pangan kategori minuman yang mengandung es. Program Pasar Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100%** dengan kriteria **Baik**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu : Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor Ijin Edar, tanggal kadaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2

keterangan:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.1.81 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Baik

Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 100,00%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga didapat persentase capaian sebesar 100,00% yang termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1.82. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	2020	90	93.55	103.95
	2021	100	100	100

Persentase capaian untuk indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020, namun masih berada dalam kategori yang sama yaitu **Baik** seperti tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1.83 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100

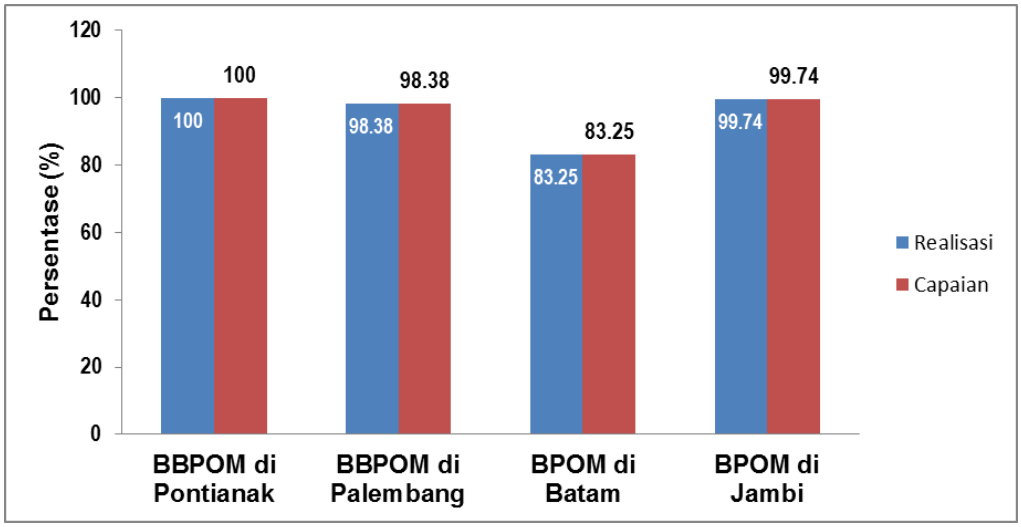
Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 adalah 100%. Capaian tahun 2021 sudah

melampaui target tahun 2024 yaitu sebesar 100,00% dari target 100 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.84 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	100	98.38	83.25	99.74
	Capaian	100	98.38	83.25	99.74



Grafik 3.1.19. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar menunjukkan bahwa BBPOM di Pontianak, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Jambi termasuk dalam kriteria **Baik**. Sedangkan BPOM di Batam termasuk dalam kriteria **Cukup**. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Capaian BBPOM di Pontianak paling tinggi

dibanding Balai lain diikuti BPOM di Jambi, BBPOM di Palembang dan BPOM di Batam.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan *output* dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

a. Pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan pedoman sampling tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sampling tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Dukungan instansi Dinas Kesehatan terhadap sampling obat.
c. Ketersediaan alat laboratorium dengan teknologi canggih sehingga jumlah sampel dalam sekali pengujian menjadi lebih banyak.
d. Ketersediaan personel pemeriksaan dan pengujian dengan kompetensi yang memadai.
e. Ketersediaan reagen, media mikrobiologi, dan baku pembanding yang memenuhi syarat, sesuai kebutuhan dan tepat waktu juga sangat membantu kelancaran proses pengujian.
f. Integrasi dan konsistensi penerapan dokumen ISO 17025:2017 ke dalam dokumen ISO 9001:2015.
g. Akses informasi yang lebih mudah membantu personel pengujian dalam mengembangkan kompetensinya dalam melakukan pengujian menggunakan teknologi mutakhir.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terkait Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar adalah 60 orang. SDM yang ada saat ini adalah 27 orang.

Terdapat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya yang

sangat besar untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebesar 1,04 kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a) Perencanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian, sehingga jenis dan jumlah obat yang disampling dapat ditindaklanjuti oleh kelompok substansi pengujian,
b) Pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan reagen sesuai dengan kebutuhan,
c) Peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2020 berupa:

1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelatihan internal maupun eksternal berupa Bimbingan Teknis bagi laboratorium Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Mikrobiologi serta pelatihan eksternal untuk personel pemeriksaan.
2. Penambahan ruang lingkup parameter uji laboratorium obat 33 parameter, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11 parameter, Kosmetika 21 parameter, Pangan 4 parameter, dan Mikrobiologi 18 parameter.
3. *Refreshment* alat laboratorium

SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100. Capaian indikator ini merupakan gabungan dari output bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Tabel 3.1.85 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2021, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, bahwa realisasi (100,00%) sama dengan target (100,00%) dengan capaian sebesar 100,00%. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa

dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.1.86 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	90,00	86,35	95,94	Baik
	2021	100,00	100,00	100,00	Baik

Definisi Operasional tahun 2021 untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang Diuji Sesuai Standar meliputi :

a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.1.87 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun 2024

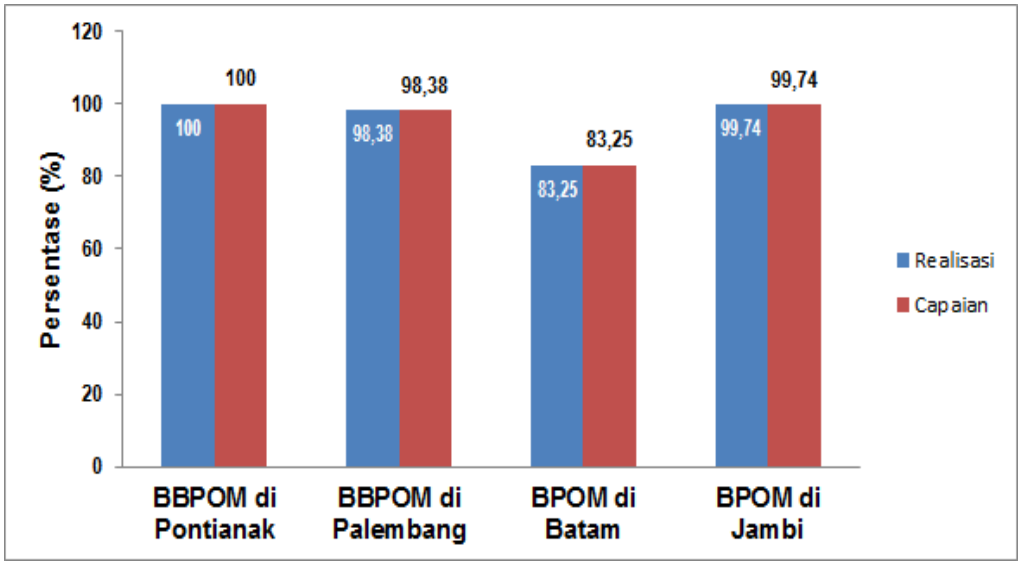
Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 adalah 100,00%. Capaian tahun 2021 sebesar 100,00% dari target 100% di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.88 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	100,00	98,38	83,25	99,74
	Capaian	100,00	98,38	83,25	99,74



Grafik 3.1.20. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik** sama dengan BBPOM di Palembang, BPOM di Batam, dan BPOM di Jambi. Untuk indikator ini BBPOM di Pontianak meraih capaian tertinggi yaitu 100%, diikuti BPOM di Jambi (99,74%), BBPOM di Palembang (98,38%) dan BPOM di Batam (83,25%).

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan pedoman sampling tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sampling tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Dukungan instansi Dinas Kesehatan terhadap sampling makanan.
3. Ketersediaan alat laboratorium dengan teknologi canggih sehingga jumlah sampel dalam sekali pengujian menjadi lebih banyak.
4. Ketersediaan personel pemeriksaan dan pengujian dengan kompetensi yang memadai.
5. Ketersediaan reagen, media mikrobiologi, dan baku pembanding yang memenuhi syarat, sesuai kebutuhan dan tepat waktu juga sangat membantu kelancaran proses pengujian.
6. Integrasi dan konsistensi penerapan dokumen ISO 17025:2017 ke dalam dokumen ISO 9001:2015.
7. Akses informasi yang lebih mudah membantu personel pengujian dalam mengembangkan kompetensinya dalam melakukan pengujian menggunakan teknologi mutakhir.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terkait Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar adalah 60 orang. SDM yang ada saat ini adalah 27 orang.

Berdasarkan data tersebut terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebesar 1 kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a) Perencanaan sampling sudah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian, sehingga jenis dan jumlah yang disampling dapat ditindaklanjuti oleh kelompok substansi pengujian,
b) Pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan reagen sesuai dengan kebutuhan,
c) Peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar

8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi

Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2020 berupa:

1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelatihan internal maupun eksternal berupa Bimbingan Teknis bagi laboratorium Pangan dan Mikrobiologi serta pelatihan eksternal untuk personel pemeriksaan.
2. Penambahan ruang lingkup parameter uji laboratorium Pangan 4 parameter, dan Mikrobiologi 15 parameter.
3. Refreshment alat laboratorium

SASARAN STRATEGIS 7
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **109,89%** dengan kriteria **Baik**

SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 3.1.89 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91	100	109,89	Baik

Pada tahun 2021, indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau mencapai realisasi sebesar 100%

berada di atas target (91%) dengan capaian sebesar 109,89%, termasuk dalam kriteria **Baik**.

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2021 didukung oleh efektifitas koordinasi dalam lingkup *Criminal Justice System* (CJS) dalam penyelesaian berkas perkara, sehingga target perkara yang ditangani tahun 2021 dan perkara carry over tahun 2020 dapat diselesaikan hingga tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.90 Pencapaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	88	90,5	102,82	Baik
	2021	91	100	109,89	Baik

Capaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2020 dan 2021 termasuk kategori Baik. Kenaikan capaian indikator kinerja ini di tahun 2021 didukung oleh pencapaian penyelesaian seluruh target perkara hingga tahap II dan tidak ada perkara *carry over*.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00	100	94,00

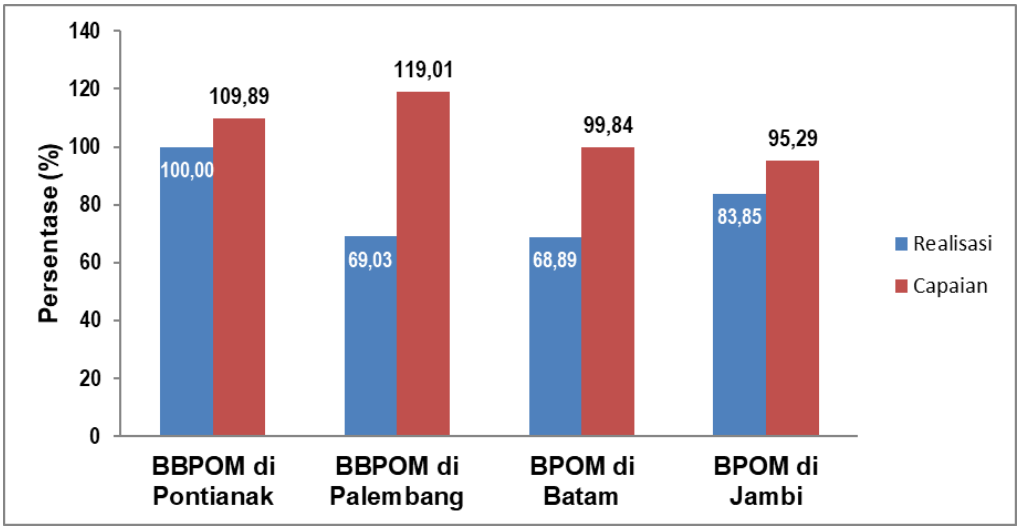
Realisasi indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 mencapai 100%, melampaui target 91%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2021 ini sebesar 100% dari target 94% pada akhir Renstra 2020-2024. Capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 106,38% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan tahun 2021 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra 2020-2024. Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.92 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Persentase keberhasilan	Realisasi	100	69,03	68,89	83,85

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Capaian	109,89	119,01	99,84	95,29



Grafik 3.1. 21. Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik**. Bila dibandingkan dengan 3 (tiga) balai yang lain, indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palembang dengan realisasi 69,03% memiliki capaian 119,01% (kriteria Sangat Baik); Balai POM di Batam dengan realisasi 68,89% memiliki capaian 99,84% (kriteria Baik); dan Balai POM di Jambi dengan realisasi 83,85 memiliki capaian 95,29% (kriteria Baik), terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak lebih tinggi daripada realisasi ketiga Balai Besar/Balai POM pembanding tersebut.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan antara lain :

a. Petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan penyidikan.
b. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur *Criminal Justice System*, antara lain :
    - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat seperti bantuan teknis pengamanan di lapangan dan proses penyidikan dari Korwas PPNS, dan ekstraksi perangkat komunikasi oleh Subdit V Cyber Crime.
    - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat seperti konsultasi hukum dan penyelesaian berkas perkara.
    - Pengadilan Negeri seperti konsultasi dan penetapan penyitaan.
c. Lintas sektor terkait lainnya antara lain Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, dan Dinas Kesehatan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat *gap* SDM di Kelompok Substansi Penindakan antara kebutuhan jumlah SDM dengan SDM yang tersedia. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan adalah 8 (delapan) orang PFM. SDM yang tersedia sebanyak 5 (lima) orang PFM yang terdiri dari 3 (tiga) orang PPNS. Ketiga orang PPNS selain melakukan penyidikan juga melakukan kegiatan intelijen, 2 (dua) orang personil lainnya dikhususkan untuk melakukan kegiatan intelijen, sehingga dapat mendukung keberhasilan intelijen dan penyidikan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 1,1 yang termasuk kriteria **Efisien**. Hal ini didukung oleh perencanaan yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai (tepat waktu, tepat anggaran), serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan berkala.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat baik secara formal (seperti *Focus Group Discussion*) dan informal. Selain itu juga peningkatan koordinasi dalam rangka bantuan teknis dan taktis dengan Kepolisian Resort.

b) Peningkatan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya kompetensi dalam mengungkap kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan, penguasaan bahasa asing (Hakka/Tio Tjiu) yang diperlukan dalam pengungkapan kejahatan.

c) Penambahan alat khusus yang mendukung kegiatan intelijen.

d) Peningkatan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom di Balai Besar POM di Pontianak

8) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan kinerja tahun 2020, yaitu :

1) Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Subdit V Cyber Crime terkait kejahatan Obat dan Makanan secara daring.

2) Peningkatan kompetensi melalui diklat PPNS, Bimbingan Teknis Intelijen, Pelatihan Open Source Intelligence (OSINT), dan Bimbingan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **98,50%** dengan kriteria **Baik**

SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.93 Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

ndikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %)	Kriteria
ndeks RB Balai Besar POM di Pontianak	84,90	84,87	99,96	Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak sebesar 84,87 dari target 84,90 dengan persentase capaian kinerja 99,96% kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.94 Perbandingan Pencapaian Indeks RB BBPOM Pontianak Tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	2020	90	76,74	85,27	Cukup
	2021	84,90	84,87	99,96	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 14,69 dari 85,27 (tahun 2020) menjadi 99,96. Walaupun terjadi penyesuaian target, realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak tetap mengalami peningkatan sebesar 8,13 dari 76,74 pada tahun 2020 menjadi 84,87 pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	84,90	84,87	87,90

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Indeks RB tahun 2021 adalah 84,87 atau 96,55% dari target 87,90 pada akhir tahun Renstra 2020-2024. Akan dilakukan berbagai upaya dan terobosan pada setiap area perubahan RB dan mengupayakan predikat WBBM pada tahun 2022

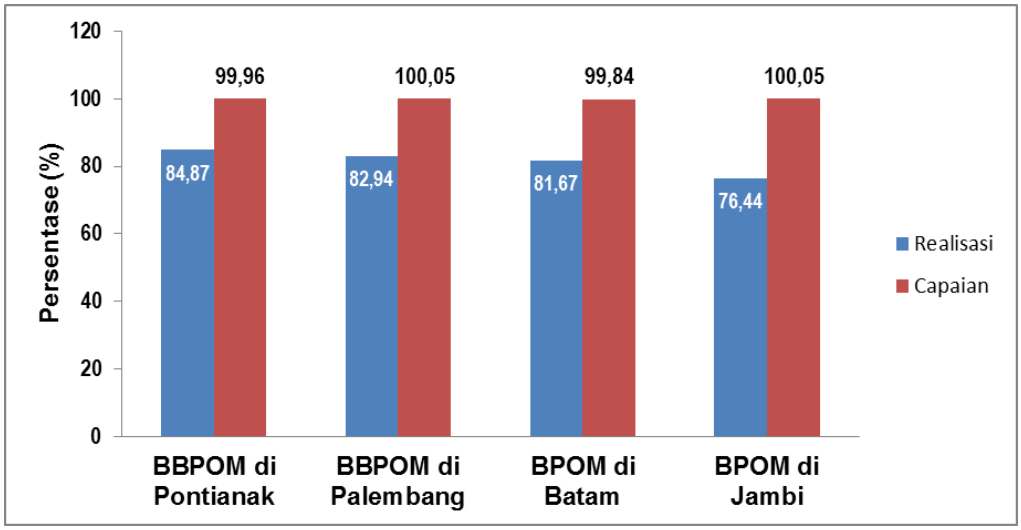
sebagai kelanjutan predikat WBK yang diterima pada tahun 2019, sehingga target akhir Renstra dapat dicapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.96 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks RB	Realisasi	84,87	82,94	81,67	76,44
	Capaian	99,96	100,05	99,84	100,05

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Jambi berada di kriteria **Baik**.



Grafik 3.1.22. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Balai Besar POM di Pontianak juga telah melakukan peningkatan pada sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya telah dioptimalkan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di Pontianak.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks RB sebesar 1**,** yang termasuk kriteria Efisien (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut antara lain:

1. Sosialisasi dan internalisasi peta bisnis proses dan SOP Mikro
2. Internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif pada masing-masing kelompok Substansi, antara lain Pojok RB, SPOT (SPirit Of The day),
3. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik antara lain aplikasi siPerkasa, Tracking, Aplikasi Whatsapp Business SIMPATIK (Saluran InforMasi dan Pengaduan cepAT melayanI Konsumen BBPOM Pontianak), Aplikasi AGI JAKK, Aplikasi ASTAGA (Aplikasi Surat Tugas BBPOM Pontianak), Corak Insang, Jaring Laba-Laba, WHATSAAP BUSINESS, Jumpe Pak Long!, PARIS (Papan Resiko), KOPER (Kontak

Pengendalian Resiko), MANRISK (Mitigasi Resiko), AKUMU (Aplikasi Buku Tamu),

4. Membuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* secara berkala.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas capaian Indeks RB yang belum memenuhi target antara lain pencanangan Balai Besar POM di Pontianak *goes to* WBBM, sosialisasi dan internalisasi RB ke semua pegawai, membangun aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan, penguatan tim RB dan tim AOC, dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. **Perencanaan Kinerja (30%)** meliputi aspek :
   a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
   b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. **Pengukuran Kinerja (25%)** meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%)
   b. Kualitas pengukuran (12,5%)
   c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. **Pelaporan Kinerja (15%)** meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%)
   b. Kualitas pelaporan (7,5%)
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. **Evaluasi Internal (10%)** meliputi aspek:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%)
   b. Kualitas evaluasi (5%)
   c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. **Capaian Kinerja (20%)** meliputi aspek:
   a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
   b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
   c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.97 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80,1	77,72	97,03	Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks AKIP Balai Besar POM di Pontianak sebesar 77,72 dari target 80,10 dengan persentase capaian kinerja 97,03% kriteria Baik**.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.98 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP UPT	2020	80	77,57	92	Baik
	2021	80,1	77,72	97,03	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,15 dari 77,57 (tahun 2020) menjadi 77,72.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80,10	77,72	87,6

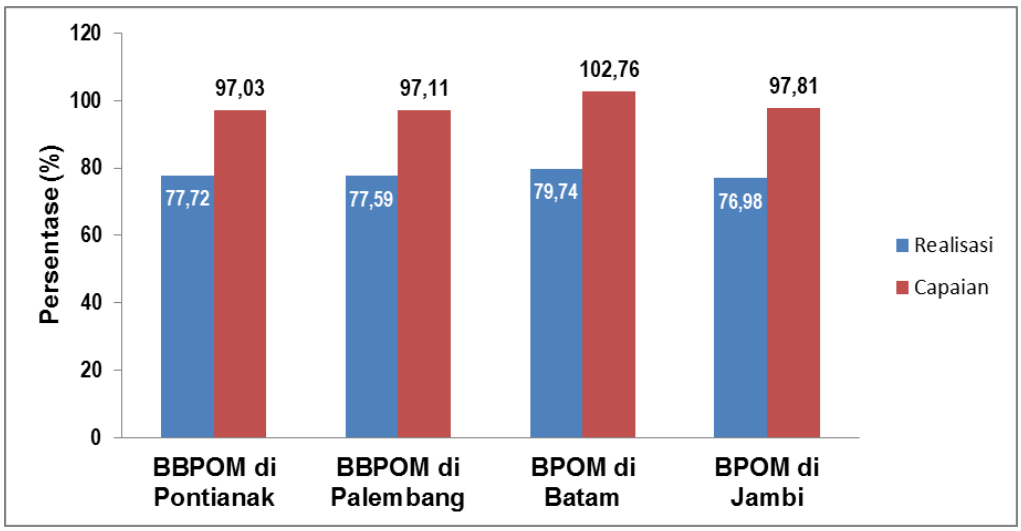
Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Nilai AKIP tahun 2021 adalah 77,72 atau 88,72% dari target 87,6 pada akhir tahun Renstra 2020-2024. Akan dilakukan berbagai upaya perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi monev SAKIP 2019.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.100 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Nilai AKIP	Realisasi	77,72	77,59	79,74	76,98
	Capaian	97,03	97,11	102,76	97,81

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai AKIP pada semua Balai termasuk dalam kriteria **Baik**.



Grafik 3.1. 23. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari segi capaian, Balai Besar POM di Pontianak sudah masuk kategori Baik namun belum mencapai target. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator Nilai AKIP antara lain:

- Proses pelaksanaan evaluasi internal sudah dilaksanakan, namun belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- Evaluasi belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja secara detail.
- Pelaksanaan pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara rutin dan belum menyajikan alternatif perbaikan jika indikator belum mencapai target

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya telah diberdayakan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pencapaian Nilai AKIP pada Balai Besar POM di Pontianak.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai AKIP sebesar 0,98 yang termasuk kriteria Kurang Efisien (Tabel 3.2.2). Hal ini disebabkan oleh pengukuran kinerja, serta monitoring dan evaluasi capaian belum dilakukan secara detail dan komprehensif.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Nilai AKIP tahun 2021 antara lain:

1) Melakukan perbaikan perencanaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;
2) Melakukan perbaikan pengukuran kinerja antara lain membuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara triwulan.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan, termasuk kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjutnya.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Beberapa rekomendasi berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 yang diberikan tim evaluator guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1) Perencanaan

Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan disertai dengan rincian anggaran dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;

2) Pengukuran

a. Melakukan perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melengkapi klausul mengenai penanggung jawab data dan prosedur penanganan apabila ada kesalahan data.
b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment; (Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Level Eselon III, IV sd Individu).
c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM;

3) Pelaporan

a. Memanfaatkan informasi kinerja dalam rangka memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja khususnya dalam penetapan target renstra yang telah/akan tercapai di tahun berjalan
b. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya dan menyajikan kedalam Laporan Kinerja tahun berjalan.

4) Evaluasi Internal

a. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan analisis simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.
b. Menyusun RATL untuk mengatasi kendala/hambatan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, serta membahas dan mendokumentasikan tindak lanjut RATL periode sebelumnya dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5) Capaian Kinerja

a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.
b. Memanfaatkan evaluasi internal intenal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.

Terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2021 tersebut, Balai Besar POM di Pontianak terus melakukan perbaikan dan akan terus ditindak lanjuti secara konsisten antara lain:

1) Perbaikan perencanaan yaitu mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;
2) Perbaikan pengukuran kinerja yaitu dengan membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman, berkoordinasi dengan unit pusat terkait dalam hal pelaporan dan pendampingan/bimbingan teknis.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, membuat rencana aksi tindak lanjut dan alternatif-alternatif tindakan untuk mencapai target indikator.

SASARAN STRATEGIS 9
Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mewujudkan sumber daya manusia yang berkinerja optimal di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **102,18%** dengan kriteria **Baik**

SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.101 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	83	84,81	102,18	Baik

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 84,81 dari target 83 dengan capaian sebesar 102,18% dan termasuk kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.102 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN tahun Balai Besar POM di Pontianak	2020	75	82,96	110,61	Sangat Baik
	2021	83	84,81	102,18	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,85 dari 82,96 (tahun 2020) menjadi 84,81.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.103 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	83	84,81	83,75

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 adalah 84,81 dari target 83. Capaian tersebut sebesar 101,26% dari target 83,75 pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

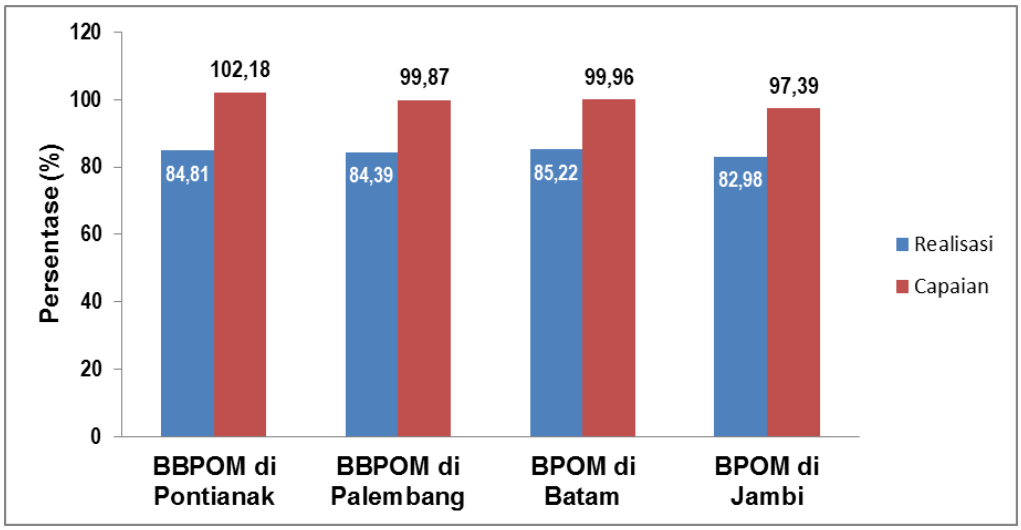
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.104. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks Profesionalitas ASN	Realisasi	84,81	84,24	85,22	82,98
	Capaian	102,18	99,69	99,96	97,39

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di

Palembang, Balai POM di Batam dan Balai POM di Jambi masuk dalam kriteria **Baik**. Dengan capaian tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Pontianak.



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indiktor Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Pontianak didukung antara lain oleh :

a. Pegawai yang memenuhi kualifikasi, dengan latar belakang pendidikan formal yang memadai.

b. Konsistensi pengembangan kompetensi semua pegawai. Dipersyaratkan setiap pegawai harus mengikuti miinimal 20 JP setahun, namun berdasarkan data pengembangan kompetensi rata-rata pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi 76 JP dalam setahun.

c. Komitmen yang tinggi untuk mencapai SKP yang ditetapkan.

d. Tingkat kepatuhan pegawai yang tinggi terhadap peraturan Disiplin Pegawai.

e. mengaplikasian inovasi yang telah ada oleh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan kualitas kinerja

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh SDM Balai Besar POM di Pontianak telah diberdayakan, didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi melalui diklat/*workshop*/seminar dan sejenisnya. Balai Besar POM di Pontianak juga berupaya mengendalikan disiplin pegawai dengan pemberian *reward* dan *punishment.* Sebagian besar pegawai dengan realisasi 84,81 telah memberikan kontribusi yang sangat baik untuk pencapaian indeks Profesionalitas ASN.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Profesionalitas sebesar 1 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh pegawai yang disiplin, kompeten, berintegritas serta realisasi anggaran terkait indeks tersebut selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

a. Kualifikasi pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Sanggau sudah memadai. Sebagian besar pegawai berlatar pendidikan formal antara lain S2/Profesi sebanyak 30 orang, S1/D4 sebanyak 46 orang, dan D3 sebanyak 18 orang.
b. Pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan secara konsisten. Dipersyaratkan setiap pegawai harus mengikuti miinimal 20 JP setahun, namun berdasarkan data pengembangan kompetensi rata-rata pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi 76 JP dalam setahun.
c. Telah dilakukan pengukuran kinerja semua pegawai secara transparan melalui capaian SKP secara periodik.
d. Penerapan disiplin kepada seluruh pegawai termasuk penerapan sanksi kepada pegawai yang melanggar.

e. Pemberian kesempatan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada pegawai sesuai kebutuhan kualifikasi dan kompetensi. Pada tahun 2021 kesempatan Tugas Belajar diberikan kepada 7 (tujuh) orang pegawai, dan Izin Belajar kepada 4 (empat) orang pegawai.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Menindaklanjuti Laporan Evaluasi Triwulanan, telah dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi, penerapan disiplin, penilaian prestasi kerja secara konsisten agar indeks Profesionalitas ASN dapat tercapai.

SASARAN STRATEGIS 10
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **87,72%** dengan kriteria **Cukup**

SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan laboratorium yang meliputi kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi personel, dan peralatan laboratorium yang dibandingkan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun 2020-2024 yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berikut adalah perbandingan nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap standar Kemampuan Laboratorium dengan target Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 3.1.105. Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	76	77,1	101,4	Baik

Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap standar Kemampuan Laboratorioum adalah 77,1%. Nilai capaian indikator kinerja utama ini adalah 101,45 % dari target yang ditetapkan Balai Besar POM di Pontianak untuk tahun 2021 sebesar 76,00 % dengan kategori **Baik**.

Nilai pemenuhan persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP ditentukan oleh tiga hal yaitu persentase pemenuhan standar ruang lingkup dengan nilai pemenuhan 77,8%, persentase pemenuhan standar kompetensi 85,3%, dan persentase pemenuhan standar peralatan 68,1%.

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.106. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium

No	Bidang/Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1.	Obat dan Nappza	70,0	92,0	64,4
2.	Pangan	78,0		
3.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,3		
4.	Kosmetika	88,3		
Rata-rata kimia		80,7	92,0	64,4
5.	Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	75,0	78,6	71,8
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		77,8	85,3	68,1
Nilai Pemenuhan GLP		77,1 %		
Nilai Target sesuai Renstra Badan POM		>65 %	>75 %	> 70 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.107 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2020	88	71,5	81,25	Baik
	2021	76	77,1	101,4	Baik

Capaian target tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020, hal ini karena terjadi penyesuaian target pada 2021. Dari rincian komponen penyusun

pengukuran capaian indikator ini, terjadi kenaikan capaian pada komponen Standar Ruang Lingkup dari 67,7 % di tahun 2020 menjadi 77,8 % di tahun 2021; dan komponen Standar Peralatan dari 57,2 % di tahun 2020 menjadi 68,1 % pada tahun 2021. Komponen yang mengalami penurunan adalah Standar Kompetensi Personel dari 91,8 % di tahun 2020 menjadi 85,3 % di tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Berikut adalah perbandingan capaian persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target renstra tahun 2024.

Tabel 3.1.108 Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	76,0	77,1	91,00

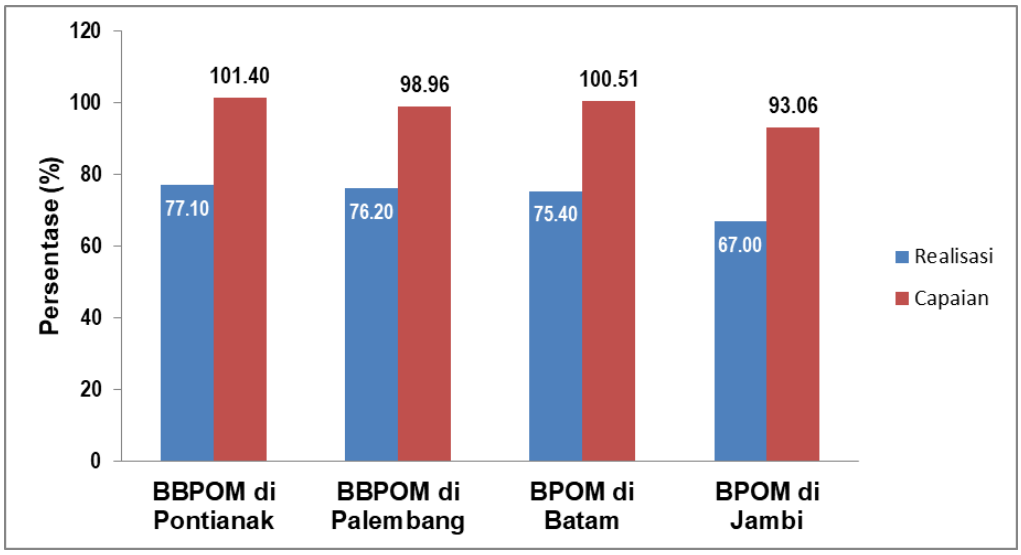
Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP tahun 2021 adalah sebesar 101,4% dari target 76%. Capaian tersebut adalah 84,72 % dari target 91% pada akhir tahun Renstra 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.109 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	Realisasi	77,1	76,2	75,4	67,0
	Capaian	101,4	98,96	100,51	93,06

Berdasarkan tabel tersebut diketahui capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk Balai Besar POM di Pontianak adalah 101,4 % termasuk dalam kriteria **Baik**, lebih tinggi dari capaian BPOM di Batam, BBPOM di Palembang, dan BPOM di Jambi.



Grafik 3.1.25. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan nilai pemenuhan per komponen Standar Kemampuan Laboratorium, diperoleh rincian Persentase pemenuhan:

a. Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup 77,8,7%
b. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi 85,3%
c. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium 68,1%

Secara umum terjadi kenaikan pencapaian Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP. Peningkatan terjadi pada pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup dan Standar Alat Laboratorium. Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan capaian ini antara lain :

1. Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik antara substansi inspeksi dan pengujian dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian dengan upaya memperlebar jangkauan sampling jenis produk obat dengan berbagai zat aktif yang belum pernah dilakukan sampling dan pengujian sebelumnya.
2. Adanya simulasi Road Map SKL triwulan yang dikawal oleh internal maupun eksternal (P3OMN).
3. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan laboratorium antara lain baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, dan bahan pendukung lainnya agar dapat dilakukan pengujian secara efektif.
4. Peningkatan kompetensi penguji laboratorium yang dilakukan sesuai analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan standar kompetensi masing-masing jenjang PFM.
5. Perencanaan pengadaan alat laboratorium yang mempertimbangkan pemenuhan standar minimal laboratorium dan rekomendasi oleh PPPOMN.

Di sisi lain, pemenuhan komponen standar kompetensi mengalami penurunan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Adanya mutasi personil laboratorium pengujian yang berkompeten ke substansi atau unit lain.
2. Beberapa personil baru (CPNS) yang masih memiliki kompetensi terbatas yang harus dikembangkan agar sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan.
3. Adanya perubahan *tools* penilaian dalam komponen standar kompetensi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi dan ruang lingkup pengujian. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP masuk dalam kriteria **Efektif** dengan nilai IE sebesar 1 (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menyebabkan capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar GLP di atas target antara lain:

a. Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan pemenuhan standar ruang lingkup yang memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada
b. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi personil
c. Perencanaan pengadaan alat laboratorium yang sesuai dengan rekomendasi PPPOMN,
d. Monitoring dan Evalausi capaian SKL yang dilakukan secara berkala tiap triwulan.

8) **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Telah dilakukan juga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemenuhan Standar Pemenuhan GLP yang baru pada Triwulan ke IV tahun 2020, TW I, TW II, dan TW III tahun 2021 yaitu perencanaan pelatihan dan magang, penambahan ruang lingkup pengujian dan pengadaan alat yang mengacu pada standar Pemenuhan GLP yang baru.

SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal

Capaian indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak merupakan rerata dari Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi dan Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi diperoleh dengan menghitung rata rata 4 komponen Indeks yang meliputi
   1) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-Email Corporate
   2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC
   3) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - *Sharing folder*
   4) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual
b. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, yang merupakan jumlah dari:
   1) Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT (80 %)
   2) Nilai Indeks Data Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER (20 %)

Nilai Indeks tersebut diukur dari skala 0 - 3.

a. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-email

   BPOM email adalah pemanfaat akun *email corporate* bagi seluruh pegawai Badan POM
b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-BOC

   Dinilai dari frekuensi akses dan login seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke aplikasi Badan POM *Operational Center (BOC)*
c. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-*sharing folder*

Dinilai dari frekuensi akses seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke dokumen *sharing folder*.

d. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-Berita Aktual Dinilai dari jumlah *upload* berita yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak
e. Nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC-SIPT Dinilai dari realisasi data dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu.
f. Nilai indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC-SPIMKER Dinilai dari jumlah *entry* data keracunan sepanjang tahun 2021

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun 2021 adalah sebesar 1,48 dari target 2 dengan capaian 74,0%, termasuk dalam kriteria **Cukup**.

Tabel 3.1.110.Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2	1,48	74	Cukup

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.111 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2020	1,5	1,95	130	Tidak dapat disimpulkan
	2021	2	1,48	74	Cukup

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,47 dari nilai 1,95 pada tahun 2020 menjadi 1,48 pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.112 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2	1,48	3

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2021 sebesar 1,48 dari target 2. Capaian tahun 2021 sebesar 49,16% dari target 3 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

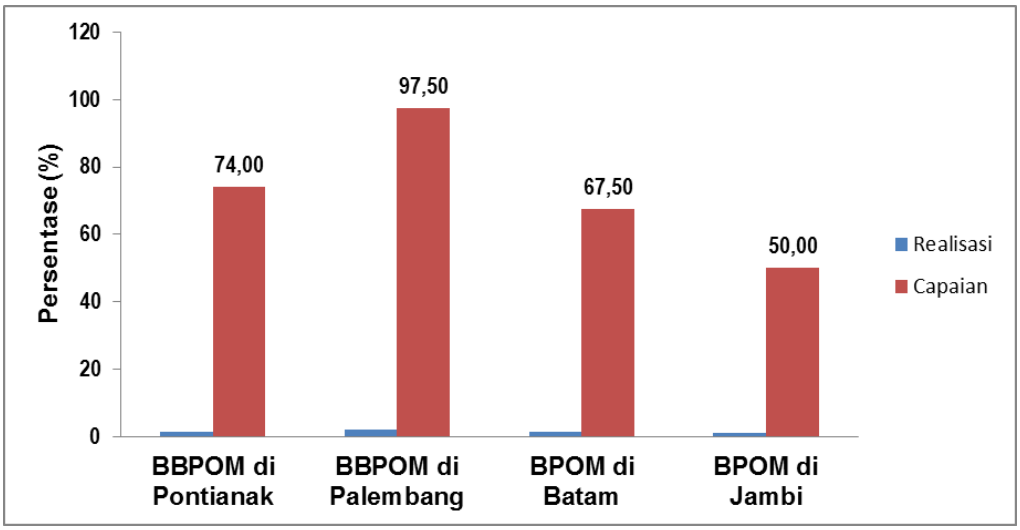
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.113 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Realisasi	1,48	1,95	1,35	1,0
	Capaian	74	97,50	67,50	50

Berdasarkan tabel tersebut diketahui realisasi capaian indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Cukup**, Balai Besar POM di Palembang termasuk kriteria **Baik** sedangkan

dua balai pembanding lainnya yaitu Balai POM di Batam dan Balai POM di Jambi masuk dalam kategori **Kurang**.



Grafik 3.1.26. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Rendahnya nilai indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC (indeks per TW = 0), hal ini dikarenakan terjadinya kekosongan dan pergantian pimpinan sehingga perlu penyesuaian akun.
2. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER, yaitu sebesar 0,6. Hal ini berkaitan dengan entry data keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit.
3. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT yang rendah (0,8) hal ini dikarenakan belum sempurnanya penyimpanan dalam SIPT sehingga penginputan menumpuk di TW 4 dan sebagian lagi tertunda.

4. Nilai indeks pemanfaatan Email *Corporate* sebesar 1, hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang belum memanfaatkan email corporate karena belum optimalnya sosialisasi fitur yang tersedia dalam zimbra.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak dilakukan oleh tim TI sebanyak 12 orang. Jumlah SDM ini telah sesuai dengan kebutuhannya namun diperlukan keaktifan setiap pegawai untuk memanfaatkan media data dan informasi yang telah disediakan.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

a. Pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
b. Penambahan *bandwidth* jaringan internet dan daya listrik yang memadai.
c. Meningkatkan sosialisasi dan pemanfaatan penyebaran informasi internal dengan menggunakan email corporate pegawai
d. Meningkatkan akses ke dashboard BOC
e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer
f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan SIPT.
g. Peningkatan kompetensi tim IT.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi Triwulanan antara lain:

Secara konsisten mengentry data SIPT, aktif menggunakan *sharing folder*, pemanfaatan *cloud*, dan menyebarkan informasi kegiatan melalui *subsite* pontianak.pom.go.id dan mengupload berita aktual secara intensif.

SASARAN STRATEGIS 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **101,26%** dengan kriteria **Baik**

SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.114 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	92,8	90,25	97,26%	Baik

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021, sebesar 90,25% dari target 92,8%, dengan capaian sebesar 97,26%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.115 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2020	93	87,41	93,99	Baik
	2021	92,8	90,25	97,26	Baik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2020 mencapai 87,41% sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu mencapai 90,25%. Hal ini dikarenakan peningkatan nilai IKPA dan EKA Balai Besar POM di Pontianak dari tahun sebelumnya yang menjadi bobot penilaian indikator Nilai Kinerja Anggaran.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.116 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	92,8	90,25	95,8

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 mencapai 90,25% dari target 92,8%. Realisasi Indikator ini Tahun 2021 mencapai sebesar 94,20% dari target 95,8% pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

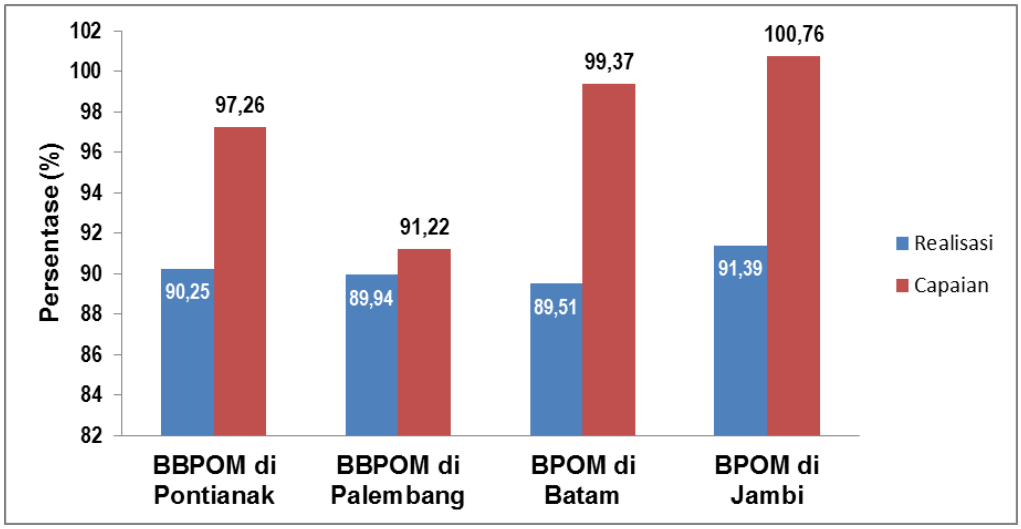
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.117 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Nilai Kinerja Anggaran	Realisasi	90,25	89,94	89,51	91,39
	Capaian (%)	97,26	91,22	99,37	100,76

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran di Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Batam belum mencapai target sedangkan Balai POM di Jambi telah mencapai target. Capaian Balai Besar POM di Pontianak sebesar 97,26% dengan kriteria **Baik** sebagaimana diraih oleh

Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Jambi.



Grafik 3.1.27. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya target kinerja anggaran Balai Besar POM di Pontianak

- Komitmen pimpinan dan para pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan
- Pelaporan LPJ bendahara yang dilaporkan tepat waktu
- Melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan realisasi anggaran serta mengantisipasi pagu minus.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak yang belum mencapai target disebabkan oleh:

- Jumlah kesalahan SPM
- Keterlambatan revolving UP
- Keterlambatan penyelesaian tagihan

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah seluruh pemegang program dan pengelola keuangan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 1 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2), yang bermakna Balai Besar POM di Pontianak mampu menggunakan input anggaran untuk mencapai output kinerja dengan efisien.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran antara lain :

- Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan pengunaan anggaran dengan baik
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara bekala
- Pelaksaanan kegiatan sesuai dengan RPD
- Pendaftaran kontrak ke KPPN sesuai waktu
- Pengelolaan UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu
- Monitoring dan evaluasi *output* kinerja
- Penyusunan Laporan Kinerja *interim* per triwulan
- Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang selalu tepat waktu
- Pengelola keuangan dan pemegang program yang kompeten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi laporan kinerja interim triwulan, antara lain percepatan pengadaan barang dan jasa, percepatan pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi anggaran secara rutin, serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penanggung jawab program.

SK.11.IKSK.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Beberapa istilah terkait penghitungan nilai indeks efisiensi adalah sebagai berikut :

a. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: IE = (%capaian output) / (%capaian input)
b. Standar efisiensi (SE) adalah 1
c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). TE = (IE - SE) / SE
d. Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.
e. Kriteria:
   - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
   - Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1.118. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	95	100	105,26	Baik

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar 100% dari target 95%. Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 sudah melebihi target dengan capaian 105,26% dengan kriteria "**Baik**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2020	80	100	125	Baik
	2021	95	100	105,26	Baik

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021 sama-sama mencapai 100%. Hal ini dikarenakan capaian realisasi anggaran seimbang dengan capaian indikator sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak bisa mencapai target.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.120 Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95	100	-

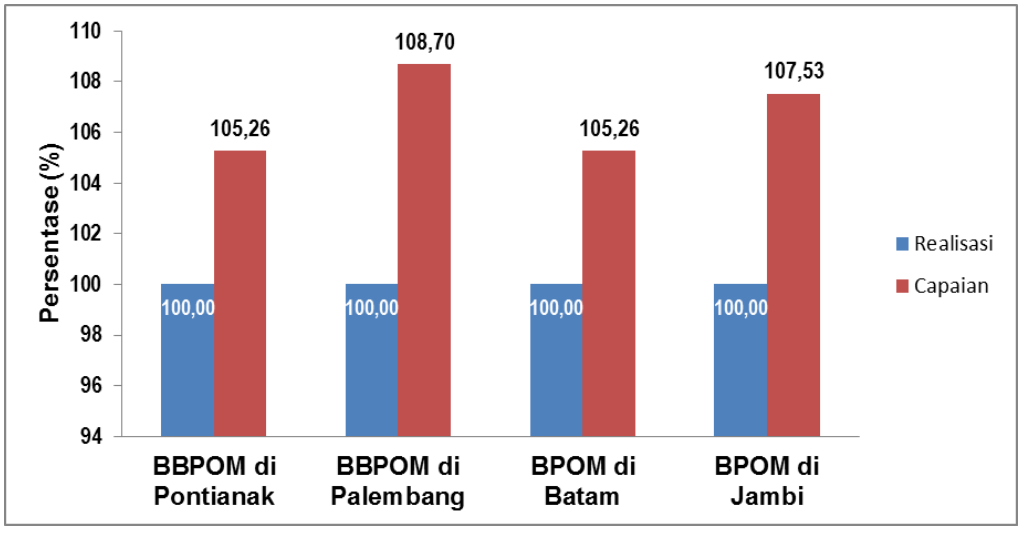
Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2021 mencapai 100% dari target 95%. Realisasi Indikator ini Tahun 2021 mencapai sebesar 105,26%, namun pada tahun 2022 indikator ini dihapuskan sesuai dengan revisi renstra BPOM tahun 2021.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.121 Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Palembang	BPOM di Batam	BPOM di Jambi
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	105,26%	108,70%	105,26%	107,53%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang dan Balai POM di Jambi telah mencapai target, namun untuk Balai POM di Batam masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada Balai Besar POM di Pontianak mempunyai capaian 105,26% dengan kategori Baik, sebagaimana diraih oleh Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palembang dan Balai POM di Jambi.



Grafik 3.1.28. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian realisasi anggaran dengan capaian indikator sudah efisien, hal ini dikarenakan capaian indikator dan anggaran sudah selaras dan sudah mencapai target.

Tercapainya target tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak dikarenakan

- Komitmen pimpinan dan para pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan
- Optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan
- Melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan realisasi anggaran serta mengantisipasi pagu minus.
- Percepatan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah seluruh pengelola keuangan dan pemegang kegiatan sehingga anggaran dapat direalisasikan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran sebesar 0,05 yang termasuk kriteria **efisien** (Tabel 3.2.2)

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari perhitungan didapatkan nilai indeks efisiensi Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,1 dan tingkat efisiensi sebesar 0,05 yang bermakna Balai Besar POM di Pontianak mampu menggunakan input anggaran untuk mencapai output kinerja dengan efisien.

Program yang menunjang capaian indikator efisiensi anggaran antara lain :

- Melakukan perencanaan kegiatan dan pengunaan anggaran dengan baik
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara bekala
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPD
- Monitoring dan evaluasi *output* kinerja dan anggaran
- Penyusunan Laporan Kinerja *interim* per triwulan
- Pengelola keuangan dan pemegang program yang kompeten

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Secara garis besar Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak bisa dilakukan dengan memperhatikan aspek perencanaan anggaran dan kegiatan serta monitoring kinerja per triwulan dengan konsisten.

3.2 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. **Perencanaan**

   Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.

   Tindak Lanjut:

   Rekomendasi telah ditindak lanjuti dengan menambahkan sub kegiatan pada RAPK.

2. **Pengukuran**

   a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
   b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment; (Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Level Eselon III, IV sd Individu).
   c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM; (Pemanfaatan TI untuk pengukuran kinerja)

   Tindak Lanjut:

   a. Telah disusun pedoman pengumpulan data kinerja agar data yang dikumpulkan akurat
   b. Telah melakukan cascading indikator kerja unit hingga ke level individu

c. Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai efektifitas penggunaan E-performance agar dapat menggambarkan kinerja unit sampai ke level individu.

3. Pelaporan

Memanfaatkan informasi kinerja dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik. Serta melakukan evaluasi serta tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut:

Pemanfaatan informasi kinerja telah digunakan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kedepannya, hal ini dapat dilihat pada Lapkin 2020.

4. Evaluasi Internal

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinetja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
b. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk mengatasi kendala/hambatan serta monitoring RATL pada Pemantauan Rencana Aksi Pengukuran Kinerja (RAPK).

Tindak Lanjut:

a. Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan setiap triwulan melalui rapat rutin pembahasan kinerja yang menghasilkan laporan evaluasi dan laporan kinerja interim
b. Telah disusun RATL setiap triwulan

5. Capaian Kinerja

Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan

mampu telusur. Selanjutnya, capaian kinerja sasaran (outcome) dan kegiatan (output) agar dimonitoring secara berkala dan dilaporkan dalam laporan kinerja.

Tindak Lanjut:

Data capaian kinerja yang dikompilasi sudah sesuai format dan perhitungan dari Biro Perencanaan dalam bentuk RHPK, dan telah dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan.

3.3 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp230.454.000	Rp229.809.160	**99,72%**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp46.589.000	Rp46.452.764	**99,71%**
		Persentase Obat yang aman dan bermutu	Rp124.983.000	Rp124.982.380	**99,99%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		berdasarkan hasil pengawasan			
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp127.891.000	Rp127.890.620	**99,99%**
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp5.012.000	Rp5.010.200	**99,96%**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp15.221.000	Rp15.218.500	**99,98%**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp64.290.000	Rp64.260.000	**99,95%**
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp65.628.000	Rp65.168.300	**99,30%**
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp36.725.000	Rp36.624.350	**99,73%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp76.102.000	Rp75.248.000	**98,88%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp18.657.000	Rp18.506.000	**99,19%**
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp118.689.000	Rp118.683.486	**99,99%**
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp53.077.000	Rp53.044.500	**99,94%**
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp287.314.000	Rp286.855.203	**99,84%**
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp566.090.000	Rp566.090.000	**100%**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp1.265.820.000	Rp1.265.430.985	**99,97%**
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp229.107.000	Rp229.002.150	**99,95%**
		Jumlah desa pangan aman	Rp709.226.000	Rp708.767.800	**99,94%**
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp106.703.000	Rp106.682.000	**99,98%**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp124.983.000	Rp124.982.380	**99,99%**
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp127.891.000	Rp127.890.620	**99,99%**
7			Rp738.034.000	Rp725.168.569	**98,26%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp176.166.000	Rp176.164.500	**99,99%**
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp33.946.000	Rp33.945.300	**99,99%**
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp11.530.291.000	Rp11.449.600.236	**99,30%**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp7.241.188.000	Rp7.238.553.182	**99,96%**
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp76.890.000	Rp76.499.000	**99,49%**
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp8.400.000	Rp8.400.000	**100%**
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp4.405.979.000	Rp4.402.415.043	**99,92%**
			Rp28.611.346.000	**Rp28.507.345.228**	**99,64%**

Pada awal tahun anggaran 2021, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar Rp31.592.258.000, namun pada pertengahan 2021 terdapat refocusing anggaran sehingga menyisakan anggaran sebesar ***Rp28.611.346.000.- (Dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah),*** dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp28.507.345.228 atau sebesar 99,64 % dan pencapaian kinerja anggaran tahun 2021 sebesar 86,59 % berdasarkan Smart DJA.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM sejak awal tahun anggaran, supaya kegiatan yang bersumber dari dana RM segara dapat dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan karena kegiatan dengan anggaran bersumber dari PNBP biasanya baru dapat direalisasikan sekitar bulan April.
2. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
3. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intensif.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \textbf{Rencana Capaian Output}}{\%\ \textbf{Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}}$$

$$= \mathbf{1}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2021, 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2 .2 Indeks dan Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	230.454.000	229.809.160	99,72%	99,87%	88,00%	86,02%	97,75%	**96,78%**	1	0,01	1	0,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	46.589.000	46.452.764	99,71%		80,00%	82,68%	103,35%		1	0,04		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	124.983.000	124.982.380	99,99%		86,00%	68,49%	79,64%		0,8	-0,16		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	127.891.000	127.890.620	99,99%		73,00%	82,80%	113,42%		1,2	0,22		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	5.012.000	5.010.200	99,96%		95,00%	85,26%	89,75%		0,9	-0,10		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	15.221.000	15.218.500	99,98%	99,98%	81	77,95	96,23%	**96,23%**	0,9	-0,04	1	-0,04
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	64.290.000	64.260.000	99,95%	99,66%	91,1	91	99,89%	**100,93%**	1	0	1	0,01

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
	Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65.628.000	65.168.300	99,30%		68,07	69,52	102,13%		1	0,03		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	36.725.000	36.624.350	99,73%		90	90,7	100,78%		1	0,01		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	76.102.000	75.248.000	98,88%	99,64%	89,00%	99,72%	112,04%	**104,79%**	1,1	0,13	1,1	0,05

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
	POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	18.657.000	18.506.000	99,19%		60%	70,37%	117,28%		1,2	0,18		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	118.689.000	118.683.486	99,99%		99,00%	99,79%	100,80%		1	0,01		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53.077.000	53.044.500	99,94%		30,00%	29,69%	98,96%		1	-0,01		
		Persentase sarana distribusi	287.314.000	286.855.203	99,84%		78,00%	73,08%	93,69%		0,9	-0,06		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
		Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan												
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	566.090.000	566.090.000	100,00%		4,01	4,25	105,99%		1,1	0,06		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.265.820.000	1.265.430.985	99,97%	99,96%	90,1	88,58	98,31%	**99,58%**	1	-0,02	1	0,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	229.107.000	229.002.150	99,95%		40	40	100,00%		1	0		
		Jumlah desa pangan aman	709.226.000	708.767.800	99,94%		12	12	100,00%		1	0		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	106.703.000	106.682.000	99,98%		4	4	100,00%		1	0		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	124.983.000	124.982.380	99,99%	99,99%	100,00 %	100%	100,00%	**100%**	1	0	1	0,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127.891.000	127.890.620	99,99%		100,00 %	100%	100,00%		1	0		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	738.034.000	725.168.569	98,26%	98,26%	91,00%	100%	109,89%	**109,89%**	1,1	0,12	1,1	0,12

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	176.166.000	176.164.500	99,99%	99,99%	84,9	84,87	99,96%	**98,50%**	1	0	0,5	-0,5
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	33.946.000	33.945.300	99,99%		80,1	77,72	97,03%		0,00	-1		
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	11.530.291.000	11.449.600.236	99,30%	99,30%	83	84,81	102,18%	**102,18%**	1	0,03	1	0,03
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	7.241.188.000	7.238.553.182	99,96%	99,73%	76,00%	77,10%	101,45%	**87,72%**	1	0,01	0,9	-0,12

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	76.890.000	76.499.000	99,49%		2	1,48	74,00%		0,7	-0,26		
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	8.400.000	8.400.000	100,00%	99,96%	92,8	90,25	97,26%	**101,26%**	1	-0,03	1	0,01
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	4.405.979.000	4.402.415.043	99,92%		95%	100%	105,26%		1,1	0,05		
			28.611.346.000	**28.507.345.228**	**99,64%**				**99,90%**	**99%**	**1**		0	

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan Indeks Efisiensi (IE) antara 0,9 s.d. 1,1, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,12 s.d. 0,12. Dengan rata-rata IE 1 maka penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi tertinggi 0,12 dicapai pada pelaksanaan sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT. Sebaliknya tingkat efisiensi terendah -0,12 pada pelaksanaan sasaran kegiatan Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 secara keseluruhan memperoleh kriteria **Baik** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 99,65%.

Berdasarkan 11 Sasaran Kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,78% (Baik)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,23% (Baik)

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,93% (Baik)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 104,79% (Baik)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,58% (Baik)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100% (Baik)
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 109,89% (Baik)
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar 98,50% (Baik)
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian kinerja sebesar 102,18% (Baik)
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan capaian kinerja sebesar 87,72% (Cukup)
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel, dengan capaian kinerja sebesar 101,26% (Baik)

Jika dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik, 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dengan kriteria Baik, dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan kriteria Cukup.

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dijumpai. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kriteria cukup, hal ini terjadi pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 berdasarkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp28.507.345.228,- (99,64%) terhadap capaian indikator sebesar 99,90%, sehingga disimpulkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah **Efisien**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Untuk sampel pendampingan UMKM yang sedang dalam proses pengajuan Nomor Izin Edar sebaiknya hasil evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil evaluasi MK/TMK sampel secara keseluruhan.
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*.
3. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala.

6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
7. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak.
8. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Pengembangan aplikasi untuk mempermudah dan mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
10. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
11. Perlu dilakukan survei terhadap desa, sekolah dan pasar yang akan menjadi lokus intervensi sebelum penetapan dari pemerintah daerah untuk melihat komitmen dan kriteria dari desa, sekolah dan pasar supaya program kegiatan terpadu bisa berdampak dan berkelanjutan dengan memilih desa, sekolah dan pasar yang tepat.
12. Pelaksanan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebelum Revisi



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mojaza Sirait, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua
Dr. Penny K. Lukito, MCP

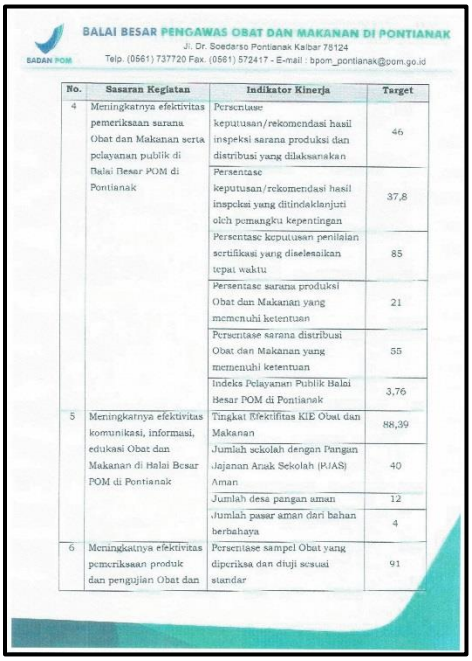
Pihak Pertama
Mojaza Sirait, S.Si., Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

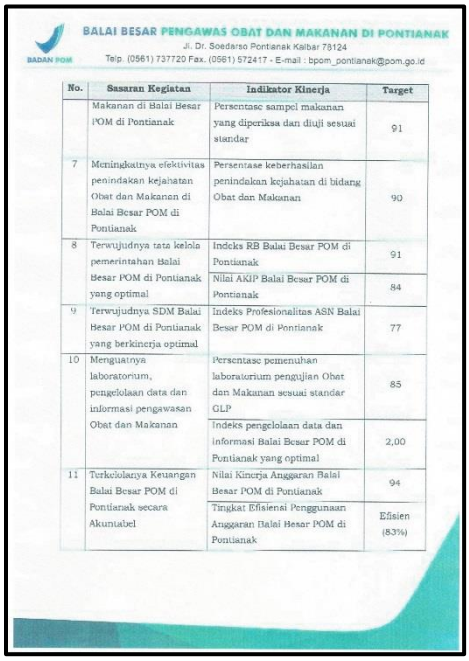
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	90



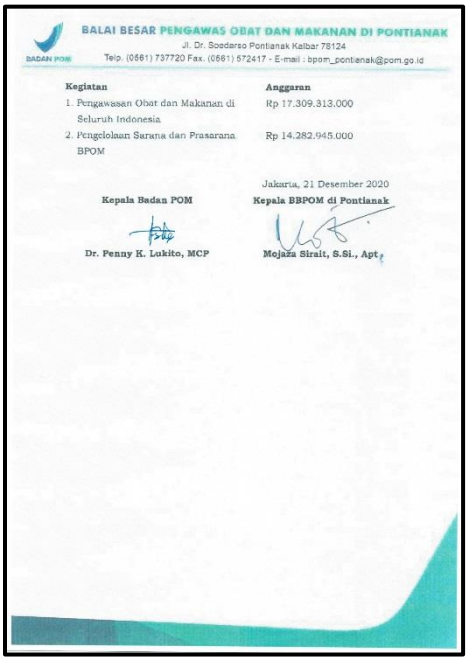
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,39
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	91
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	84
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (83%)



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 17.309.313.000
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 14.282.945.000

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala BBPOM di Pontianak
Mojaza Sirait, S.Si., Apt

Setelah Revisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Pontianak
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,08 November 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Pontianak

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.07

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.01
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.1
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	12
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.9
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.1
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.8
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95
29	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 28,611,346,000.00

Pontianak,08 November 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

LAMPIRAN 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Pontianak
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6			88	230.454.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80			80	45.684.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			94			94			94			86	124.983.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			73			73			73			73	128.343.500, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat												95	5.012.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	15.221.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.1	64.290.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.07	93.214.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90	38.862.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			46			46			46			89	75.280.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			37.8			37.8			37.8			60	16.662.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			85			85			85			99	91.418.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			21			21			21			30	53.077.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			55			55			55			78	287.679.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.01	566.090.000, 00
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			88.39			88.39			88.39			90.1	1.265.820.000, 00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			25			50			75			40	229.107.000, 00
18.	Jumlah desa pangan aman			25			50			75			12	709.226.000, 00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			25			50			75			4	106.703.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			22.75			45.5			68.25			100	124.983.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			22.75			45.5			68.25			100	128.343.500, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			22.5			45			67.5			91	694.906.000, 00
23.	Indeks RB UPT												84.9	176.396.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												80.1	34.297.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	11.527.161.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												76	7.241.188.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2			2	76.890.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			23.5			47			70.5			92.8	8.400.000, 00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			20.75			41.5			62.25			95	4.451.656.000, 00
Total														28.611.346.000, 00

Pontianak, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

LAMPIRAN 3. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Tahun 2021

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
Stakeholder Perspective									**97,98%**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,00%	86,02%	**97,75%**	**BAIK**	**96,78%**	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	82,68%	**103,35%**	**BAIK**		
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	68,49%	**79,64%**	**CUKUP**		
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	82,80%	**113,42%**	**SANGAT BAIK**		
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00%	85,26%	**89,75%**	**CUKUP**		

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	81	77,95	**96,23%**	**BAIK**	**96,23%**	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,1	91	**99,89%**	**BAIK**	**100,93%**	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,07	69,52	**102,13%**	**BAIK**		
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,7	**100,78%**	**BAIK**		

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
Internal Process Perspective									**103,57%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	99,72%	**112,04%**	**SANGAT BAIK**	**104,79%**	
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	70,37%	**117,28%**	**SANGAT BAIK**		
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	99,79%	**100,80%**	**BAIK**		
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00%	29,69%	**98,96%**	**BAIK**		
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	73,08%	**93,69%**	**BAIK**		

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,01	4,25	**105,99%**	**BAIK**		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,1	88,58	**98,31%**	**BAIK**	**99,58%**	
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	**100,00%**	**BAIK**		
		18	Jumlah desa pangan aman	12	12	**100,00%**	**BAIK**		
		19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	4	**100,00%**	**BAIK**		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100%	**100,00%**	**BAIK**	**100,00%**	
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100%	**100,00%**	**BAIK**		

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%	100%	**109,89%**	**BAIK**	**109,89%**	
Learning and Growth Perspective									**97,42%**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	23	Indeks RB UPT	84,9	84,87	**99,96%**	**BAIK**	**98,50%**	
		24	Nilai AKIP UPT	80,1	77,72	**97,03%**	**BAIK**		
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83	84,81	**102,18%**	**BAIK**	**102,18%**	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00%	77,10%	**101,45%**	**BAIK**	**87,72%**	

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian	Kriteria	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif
	obat dan makanan	27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	1,48	**74,00%**	**CUKUP**		
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,8	90,25	**97,26%**	**BAIK**	**101,26%**	
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95%	100%	**105,26%**	**BAIK**		
RATA-RATA						**99,90%**	**BAIK**		**99,65%**

LAMPIRAN 4. Rekap Capaian Nilai-nilai Indeks Tahun 2021

1. Indeks Kesadaran Masyarakat

Tabel 4.5 Indeks Kesadaran Masyarakat di Setiap Provinsi

No.	Provinsi	Capaian 2021	Target 2021	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	DKI Jakarta	87,12	85	102,49%	2,12
2	Jawa Tengah	87,05	75	116,07%	12,05
3	Kepulauan Riau	85,12	81	105,09%	4,12
4	DI Yogyakarta	84,97	80	106,21%	4,97
5	Kalimantan Timur	83,27	84	99,13%	-0,73
6	Kalimantan Selatan	79,08	81	97,63%	-1,92
7	Jawa Barat	78,33	71	110,32%	7,33

ah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8	Maluku	78,32	77	101,71%	1,32
9	Sulawesi Utara	78,15	81	96,48%	-2,85
10	Riau	78,13	78	100,17%	0,13
11	Gorontalo	78,01	82	95,13%	-3,99
12	Kalimantan Barat	77,95	81	96,23%	-3,05
13	Bengkulu	77,62	86	90,26%	-8,38
14	Jambi	77,54	75	103,39%	2,54
15	Kalimantan Utara	77,42	-	-	-
16	Sumatera Selatan	76,47	81	94,41%	-4,53
17	Bali	76,28	72	105,94%	4,28

2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 4.6 Indeks Unit Penyelenggara KBP di UPT

No	Unit Penyelenggara KBP	Jml KBP	Responden	Capaian Indeks	Target	Persen Capaian	Gap Indeks	Total skor
1	BBPOM di Jakarta	31	1086	86.7	86.6	100.1%	0.1	11
2	BBPOM di Makassar	11	133	87.3	83.5	104.6%	3.8	11
3	BBPOM di Semarang	13	304	92.1	87.1	105.8%	5.0	11
4	BBPOM di Pekanbaru	9	145	90.6	88.2	102.7%	2.4	10
5	BBPOM di Serang	8	634	86.7	84.7	102.3%	2.0	10
6	BBPOM di Surabaya	10	202	84.5	83.6	101.1%	0.9	10
7	BBPOM di Samarinda	9	36	94.3	84.6	111.5%	9.7	9
8	BBPOM di Yogyakarta	6	281	90.1	86.6	104.0%	3.5	9
9	BPOM di Ambon	10	81	89.3	88.5	100.9%	0.8	9
10	BBPOM di Banda Aceh	4	38	94.1	91.1	103.3%	3.0	8
11	BBPOM di Bandar Lampung	8	162	90.2	91.1	99.0%	-0.9	8
12	BBPOM di Bandung	12	180	86.4	91.1	94.8%	-4.7	8

ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

13	BBPOM di Banjarmasin	7	56	92.3	91.1	101.4%	1.2	8
14	BBPOM di Denpasar	16	193	85.8	90.7	94.6%	-4.9	8
15	BBPOM di Padang	4	58	85.4	82.7	103.3%	2.7	8
16	BPOM di Gorontalo	5	34	96.5	85.6	112.7%	10.9	8
17	BPOM di Kupang	8	53	90.7	90.2	100.6%	0.5	8
18	BPOM di Mamuju	5	38	93.4	91.1	102.5%	2.3	8
19	BBPOM di Palembang	8	193	83.5	88.8	94.0%	-5.3	7
20	BPOM di Batam	4	67	88.8	88.0	100.9%	0.8	7
21	BBPOM di Jayapura	5	37	90.2	91.1	99.1%	-0.9	6
22	BBPOM di Pontianak	6	42	91.0	91.1	99.9%	-0.1	6

3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 4.17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM per provinsi berdasarkan persentase capaian

No.	Provinsi	Capaian Indeks	Target Indeks	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	Gorontalo	77,43	64,53	119,99%	12,9
2	Kalimantan Tengah	69,17	63,25	109,36%	5,92
3	Jambi	76,31	70,38	108,43%	5,93
4	Kepulauan Riau	74,65	70,27	106,23%	4,38
5	Nusa Tenggara Timur	70,01	68,12	102,77%	1,89
6	Jawa Tengah	72,56	70,73	102,59%	1,83
7	Kalimantan Barat	69,52	68,07	102,13%	1,45
8	Riau	65,14	64,28	101,34%	0,86
9	Papua Barat	68,87	68,53	100,50%	0,34
10	Kalimantan Timur	72,18	72,65	99,35%	-0,47
11	Aceh	70,16	70,84	99,04%	-0,68
12	DKI Jakarta	73,8	74,98	98,43%	-1,18
13	Sulawesi Tenggara	67,2	68,36	98,30%	-1,16
14	Maluku	68,02	69,86	97,37%	-1,84

4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Nilai SKM Unit Pelayanan BB/BPOM	89,45	91,73	2,28	90,61	101,74
Balai Besar POM di Banda Aceh	93,44	94,00	0,56	95,00	99,40
Balai Besar POM di Medan	89,87	92,93	3,06	91,00	102,12
Balai Besar POM di Padang	89,97	93,13	3,16	90,50	102,91
Balai Besar POM di Pekanbaru	92,00	92,89	0,89	92,50	100,42
Balai Besar POM di Palembang	91,74	92,21	0,47	91,75	100,50
Balai Besar POM di Bandar Lampung	92,08	94,32	2,24	92,50	101,97
Balai Besar POM di Jakarta	88,19	95,61	7,42	90,00	106,23
Balai Besar POM di Bandung	85,91	93,27	7,36	87,00	107,21
Balai Besar POM di Semarang	88,11	91,84	3,73	90,00	102,04
Balai Besar POM di Yogyakarta	89,10	91,28	2,18	89,50	101,99
Balai Besar POM di Surabaya	91,50	91,72	0,22	90,00	101,91
Balai Besar POM di Serang	85,51	88,16	2,65	86,00	102,51
Balai Besar POM di Denpasar	89,28	89,56	0,28	90,00	99,51
Balai Besar POM di Mataram	90,51	93,60	3,09	92,00	101,74

Unit Pelayanan	Nilai SKM 2020	Nilai SKM 2021	Naik/ Turun	Target 2021	Capaian Target (%)
Balai Besar POM di Pontianak	89,32	90,70	1,38	90,00	100,89
Balai Besar POM di Palangka Raya	89,40	91,77	2,37	91,66	100,85
Balai Besar POM di Banjarmasin	89,18	91,99	2,81	90,00	102,21
Balai Besar POM di Samarinda	85,16	86,90	1,74	87,00	100,06
Balai Besar POM di Manado	88,12	94,76	6,64	90,00	105,29
Balai Besar POM di Makassar	93,31	92,04	-1,27	90,00	102,27
Balai Besar POM di Jayapura	88,20	91,76	3,56	89,50	102,53
Balai POM di Jambi	86,02	92,28	6,26	88,00	104,86
Balai POM di Bengkulu	92,14	90,53	-1,61	94,00	96,31

5. Indeks Pelayanan Publik

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4,25/A- (Sangat Baik)

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	• data dukung sudah lengkap • agar meningkatkan sistem antrian secara elektronik yang dibagi untuk setiap jenis layanan agar di lengkapi data dukung/ video/ foto yang menunjukan sistem antrian : ? Diarahkan ke loket yang dituju ? Dipandu melalui pengeras suara • Agar Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.
2	Profesionalisme SDM	
3	Sarana Prasarana	• Agar meningkatkan ketersediaan sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai • Agar meningkatkan ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus

6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

LAMPIRAN 2
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM
TRIWULAN 4 TAHUN 2021

	Jumlah Responden	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE
Unit Pelaksana Teknis	**15235**		**91,80**	**94,50**	**94,70**	**88,62**	**93,32**
REGIONAL SUMATERA	**7794**		**92,56**	**94,25**	**95,46**	**89,54**	**93,82**
Balai Besar POM Banda Aceh	556	90	91,98	93,38	94,6	89,79	93,18
Balai Besar POM Bandar Lampung	349	94,5	91,62	94,21	95,63	86,96	93,35
Balai Besar POM Medan	1845	94	94,67	94,67	95,45	91,11	94,41
Balai Besar POM Padang	1411	94	91,34	91,88	94,29	87,4	92,15
Balai Besar POM Palembang	206	94	95,84	97,58	97,82	92,23	96,6
Balai Besar POM Pekanbaru	542	93	91,68	94,01	95,34	90,04	93,7
Balai POM Batam	798	90	93,5	91,76	96,9	90,6	94,04
Balai POM Bengkulu	458	92	92,84	97,33	94,98	91,59	94,85
Balai POM Jambi	1003	94	91,46	94,49	94,69	88,66	93,28
Balai POM Pangkal Pinang	626	92	90,62	93,16	94,89	87,02	92,63
REGIONAL JAWA	**3083**		**89,97**	**93,32**	**94,45**	**86,41**	**92,32**
Balai Besar POM Bandung	831	92	89,96	90,66	94,31	85,53	91,35
Balai Besar POM Jakarta	273	93	91,16	97,76	94,41	87,36	93,83
Balai Besar POM Semarang	371	91,5	89,62	92,75	95,28	86,46	92,5
Balai Besar POM Serang	772	90,5	89,54	93,39	93,1	86,79	91,75
Balai Besar POM Surabaya	383	91,1	88,32	91,72	93,67	87,34	91,51
Balai Besar POM Yogyakarta	453	92	91,19	93,66	95,92	84,99	92,95
REGIONAL BALI NUSRA	**3300**		**91,81**	**94,01**	**94,02**	**87,17**	**92,63**
Balai Besar POM Denpasar	858	95	91,6	93,42	94,29	84,7	92,14
Balai Besar POM Mataram	1327	93,5	93,34	95,71	93,91	88,62	93,46
Balai POM Kupang	1115	93	90,48	92,9	93,86	88,18	92,28
REGIONAL KALIMANTAN	**2971**		**89,79**	**93,71**	**93,08**	**84,96**	**91,54**
Balai Besar POM Banjarmasin	1013	90	90,73	93	94,4	86,5	92,29
Balai Besar POM Palangkaraya	511	92	91,28	93,73	95,01	84,44	92,47
Balai Besar POM Pontianak	639	90,1	84,43	96,74	86,31	83,53	88,58
Balai Besar POM Samarinda	586	92,7	90,08	92,78	93,94	87,33	92,1
Balai POM Tarakan	222	90,5	92,44	92,3	95,72	83	92,26

7. Indeks RB UPT

PENILAIAN			Nilai	%	Keterangan
A.	PROSES (60)				
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,56	94,50%	MS
	II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	6,50	92,86%	MS
	III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	9,50	95,00%	MS
	IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,69	96,88%	MS
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	14,50	96,67%	MS
	VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	9,40	94,00%	MS
TOTAL PENGUNGKIT			57,15		MS
B.	HASIL (40)				
	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	19,21	96,00%	MS
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,21	94,75%	MS
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	18,00	90,00%	MS
		1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	18,00	90,00%	MS
TOTAL HASIL			37,21	93,03%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			94,36		

Sehubungan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Pontianak sebesar **84,87** sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.

8. Nilai AKIP UPT

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,22	26,39
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,81	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,94	11,82
d.	Evaluasi Internal	10	6,79	5,74
e.	Capaian Kinerja	20	15,81	14,71
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**77,57**	**77,72**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

9. Indeks Profesionalitas ASN UPT

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		IP	Jumlah Orang	Total IP	IP	Jumlah Orang	Total IP
17	Balai Besar POM di Denpasar	85,10	101	8595	81,05	94	7618,7
18	Balai Besar POM di Mataram	83,33	72	6000	84,37	70	5905,9
19	Balai POM di Kupang	85,32	63	5375	85	57	4845
20	Balai Besar POM di Pontianak	82,72	67	5542	84,81	73	6191,13
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	81,33	54	4393	84,64	56	4739,84
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	80,16	64	5130,5	83,09	68	5650,12
23	Balai Besar POM di Samarinda	84,46	71	5997	84,74	74	6270,76
24	Balai Besar POM di Manado	84,65	72	6095	85,14	71	6044,94
25	Balai POM di Palu	83,85	65	5450	85,3	66	5629,8
26	Balai Besar POM di Makassar	73,49	122	8966	85,44	116	9911,04
27	Balai POM di Kendari	82,80	71	5878,5	84,64	69	5840,16
28	Balai POM di Gorontalo	83,28	43	3581	81,3	46	3739,8
29	Balai POM di Ambon	82,30	60	4938	74,34	57	4237,38
30	Balai Besar POM di Jayapura	83,77	70	5864	84,93	72	6114,96

10. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Perhitungan Indeks UPT

Highlight text

Periode : Triwulan I-IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i
		SIPT (a)	SPIMKer (b)	c = a + b	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4	i = c + h / 2
		80%	20%							
1	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0,6	3	2	3	1	2	2	2,50
2	Balai Besar POM di Surabaya	1,6	0,6	2,2	3	2	3	3	2,75	2,48
3	Balai Besar POM di Jakarta	1,6	0,6	2,2	3	3	2	3	2,75	2,48
4	Balai Besar POM di Manado	1,6	0,6	2,2	2	2	3	3	2,5	2,35
5	Balai POM di Palu	1,6	0,6	2,2	1	3	2	3	2,25	2,22
6	Balai Besar POM di Padang	0,8	0,6	1,4	3	3	3	3	3	2,20
7	Balai Besar POM di Palangka Raya	0,8	0,4	1,2	3	3	3	3	3	2,10
8	Balai Besar POM di Jayapura	1,6	0,2	1,8	2	2	2	3	2,25	2,02
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	1,6	0,2	1,8	2	3	1	3	2,25	2,02
10	Balai Besar POM di Samarinda	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
12	Balai Besar POM di Palembang	0,8	0,6	1,4	3	3	2	2	2,5	1,95
13	Balai POM di Sofifi	2,4	0,4	2,8	1	1	0	2	1	1,90
14	Balai POM di Kendari	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
15	Balai POM di Bengkulu	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
16	Balai Besar POM di Denpasar	1,6	0,6	2,2	1	3	0	2	1,5	1,85
17	Balai POM di Pangkal Pinang	0,8	0,6	1,4	3	3	0	3	2,25	1,82
18	Balai Besar POM di Serang	0,8	0,6	1,4	1	3	2	3	2,25	1,82
19	Balai Besar POM di Yogyakarta	1,6	0,2	1,8	1	3	0	3	1,75	1,78
20	Balai Besar POM di Mataram	0,8	0	0,8	2	3	3	3	2,75	1,78
21	Balai Besar POM di Medan	1,6	0,2	1,8	2	1	0	3	1,5	1,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	1,6	0,2	1,8	1	2	0	3	1,5	1,65
23	Balai Besar POM di Makassar	1,6	0,4	2	1	2	0	2	1,25	1,62
24	Balai POM di Ambon	0,8	0,4	1,2	2	3	0	3	2	1,60
25	Balai POM di Manokwari	0,8	0,2	1	2	3	0	3	2	1,50
26	Balai Besar POM di Pontianak	0,8	0,4	1,2	1	3	0	3	1,75	1,48
27	Balai Besar POM di Bandung	0,8	0,6	1,4	2	2	0	2	1,5	1,45
28	Balai POM di Mamuju	1,6	0	1,6	2	1	2	0	1,25	1,42
29	Balai POM di Batam	0,8	0,4	1,2	2	3	0	1	1,5	1,35

Copyright ©2021
by BBPOM di Pontianak

